

LAPORAN KINERJA

Tahun 2023



SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Sekretariat Ditjen PDSPKP) Triwulan IV Tahun 2023 sebagai wujud pertanggungjawaban kepada *stakeholders* sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.



Laporan ini merupakan media akuntabilitas yang merinci pertanggungjawaban atas amanah yang diemban organisasi dan tanggung jawab pemakaian sumber daya untuk menjalankan misi organisasi. LKj Sekretariat Ditjen PDSPKP memuat pencapaian kinerja sasaran dan kinerja kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Ditjen PDSPKP.

Kami berharap agar laporan ini dapat memenuhi harapan sebagai media pertanggungjawaban kepada *stakeholders* dan pemacu peningkatan kinerja bagi organisasi Sekretariat Ditjen PDSPKP.

Jakarta, 19 Januari 2024

Sesditjen PDSPKP

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Machmud'.

Machmud

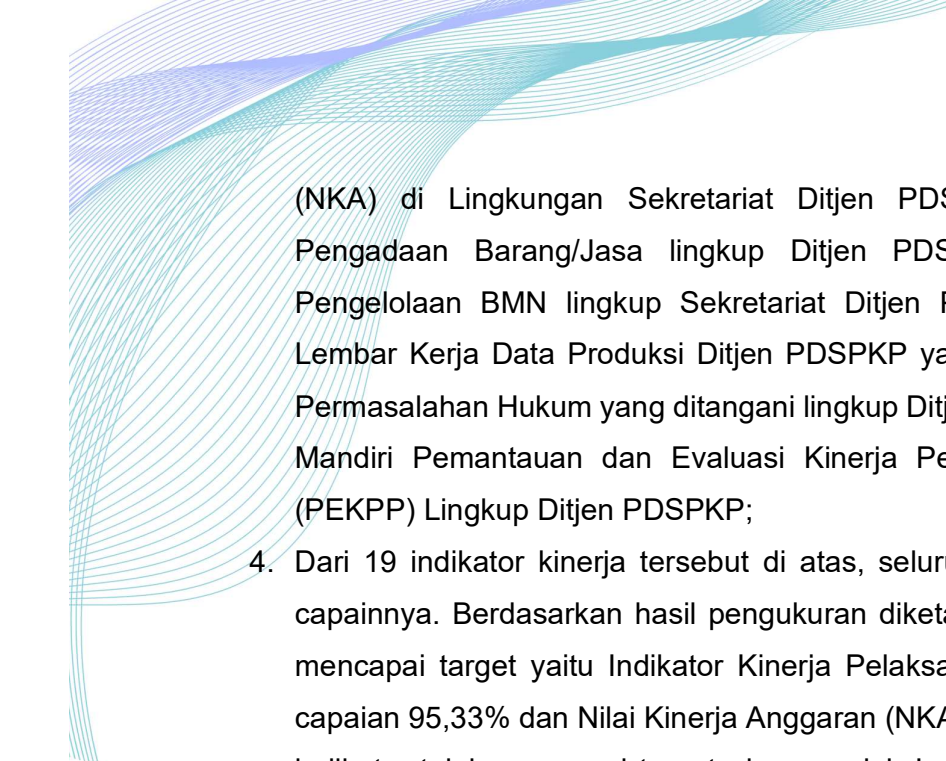


IKHTISAR EKSEKUTIF

Sekretariat Ditjen PDSPKP telah menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023. Berdasarkan perjanjian kinerja dimaksud, terdapat 19 Indikator Kinerja yang terdiri dari lima indikator kinerja bersifat triwulanan, dua indikator kinerja bersifat semesteran, dan 12 indikator kinerja bersifat tahunan.

Pencapaian Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Sekretariat Ditjen PDSPKP Triwulan IV Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Kelima indikator kinerja yang bersifat triwulanan yaitu (1) Rasio Jumlah Pemberitaan Negatif Bidang PDSPKP terhadap Total Pemberitaan Sektor KP, (2) Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di lingkungan Setditjen PDSPKP, (3) Persentase Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Ditjen PDSPKP yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar, (4) Persentase Pemenuhan Layanan Internal/*Overhead* lingkup Ditjen PDSPKP, dan (5) Jumlah Pemenuhan Layanan Perkantoran lingkup Ditjen PDSPKP;
2. Dua indikator kinerja yang bersifat semesteran yaitu (1) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Setditjen PDSPKP dan (2) Indeks Profesionalitas ASN lingkungan Setditjen PDSPKP;
3. 12 indikator kinerja yang bersifat tahunan yaitu (1) Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang PDSPKP, (2) Nilai Pengawasan Kearsipan di Unit Kearsipan PDSPKP, (3) Persentase Dokumen Kerjasama yang Disusun/Ditindaklanjuti oleh Ditjen PDSPKP, (4) Persentase Pemenuhan Dokumen Maturitas SPIP Ditjen PDSPKP, (5) Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di lingkungan Sekretariat Ditjen PDSPKP, (6) Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Sekretariat Ditjen PDSPKP, (7) Nilai Kinerja Anggaran



(NKA) di Lingkungan Sekretariat Ditjen PDSPKP, (8) Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Ditjen PDSPKP, (9) Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Sekretariat Ditjen PDSPKP, dan (10) Persentase Lembar Kerja Data Produksi Ditjen PDSPKP yang Tervalidasi, (11) Persentase Permasalahan Hukum yang ditangani lingkup Ditjen PDSPKP, (12) Nilai Penilaian Mandiri Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPP) Lingkup Ditjen PDSPKP;

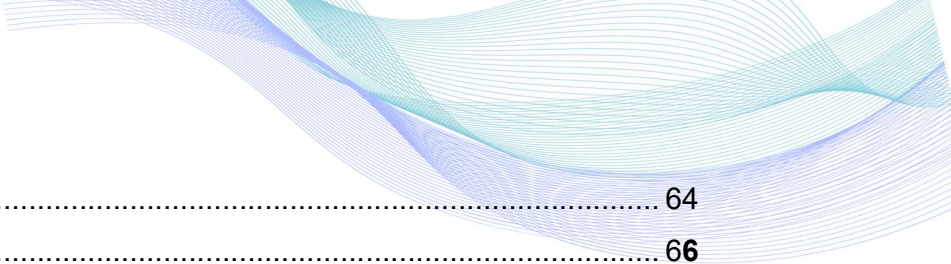
4. Dari 19 indikator kinerja tersebut di atas, seluruh indikator kinerja telah diukur capainnya. Berdasarkan hasil pengukuran diketahui dua indikator kinerja belum mencapai target yaitu Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan capaian 95,33% dan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) dengan capaian 99,47%; tujuh indikator telah mencapai target; dan sepuluh Indikator Kinerja dapat melampaui target yang ditetapkan;
5. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Sekretariat Ditjen PDSPKP yang ditunjukkan pada Aplikasi Kinerjaku berdasarkan hasil pengukuran mencapai 102,31%.
6. Realisasi anggaran Sekretariat Ditjen PDSPKP Sampai dengan triwulan IV tahun 2023 adalah sebesar Rp87.338.982.230,00 setara dengan 98,49% terhadap pagu anggaran sebesar Rp88.677.058.000,00 (Delapan puluh delapan miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta lima puluh delapan ribu rupiah). Dalam hal ini terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp1.338.075.770,00. Efisiensi anggaran juga dapat terlihat dari persentase pencapaian Nilai kinerja organisasi sebesar 102,31% lebih besar daripada persentase realisasi anggaran yaitu sebesar 98,49%.

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Tugas dan Fungsi.....	2
D. Sumber Daya Manusia	3
E. Sistematika Penyajian LKj	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	5
A. Rencana Strategis Tahun 2020-2024	5
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	6
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	9
A. Capaian Kinerja	9
B. Evaluasi dan Analisis Kinerja.....	13
Sasaran Kegiatan 1. Terlaksananya Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Lingkungan Ditjen PDSPKP	13
1. Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang- Undanguan bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	13
2. Nilai Pengawasan Kearsipan di Unit Kearsipan Ditjen PDSPKP	18
3. Persentase Dokumen Kerjasama yang Disusun/Ditindaklanjuti oleh Ditjen PDSPKP	20

4. Rasio Jumlah Pemberitaan Negatif Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan terhadap Total Pemberitaan Sektor Kelautan dan Perikanan	31
5. Persentase Pemenuhan Dokumen Maturitas SPIP Ditjen PDSPKP	33
6. Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Setditjen PDSPKP	35
7. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di lingkungan Setditjen PDSPKP.....	37
8. Persentase Penyelesaian Temuan BPK Di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (%).....	40
9. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di lingkungan Setditjen PDSPKP	42
10. Persentase Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Ditjen PDSPKP yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar.....	43
11. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Setditjen PDSPKP	45
12. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) di Lingkungan Setditjen PDSPKP	46
13. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Setditjen PDSPKP	49
14. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN di lingkungan Setditjen PDSPKP.....	51
15. Persentase Lembar Kerja Data Produksi Ditjen PDSPKP yang Tervalidasi	54
16. Persentase Permasalahan hukum yang ditangani lingkup Ditjen PDSPKP	55
17. Nilai penilaian mandiri pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik (PEKPPP) lingkup Ditjen PDSPKP.....	57
Sasaran Kegiatan 2. Terwujudnya Layanan Sarana dan Prasarana Internal lingkup Ditjen PDSPKP yang Efisien, Efektif, dan Berorientasi pada Layanan Prima	60
18. Persentase pemenuhan layanan internal/overhead lingkup Ditjen PDSPKP	60
Sasaran Kegiatan 3. Terwujudnya Pelaksanaan Layanan Perkantoran lingkup Ditjen PDSPKP yang Efisien, Efektif, dan Berorientasi pada Layanan Prima....	61
19. Jumlah Pemenuhan Layanan Perkantoran lingkup Ditjen PDSPKP	61
C. Realisasi Anggaran	62



BAB IV PENUTUP.....	64
LAMPIRAN.....	66



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Perjanjian Kinerja Sekretariat Ditjen PDSPKP Tahun 2023	6
Tabel 2. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Sekretariat Ditjen PDSPKP Triwulan IV Tahun 2023	10
Tabel 3. Ikhtisar Pencapaian Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Ditjen PDSPKP	14
Tabel 4. Ikhtisar Pencapaian Nilai Pengawasan Kearsipan di lingkungan Ditjen PDSPKP	18
Tabel 5. Ikhtisar Pencapaian Persentase Dokumen Kerjasama yang Disusun/Ditindaklanjuti oleh Ditjen PDSPKP	20
Tabel 6. Ikhtisar Pencapaian Rasio Jumlah Pemberitaan Negatif Bidang PDSPKP terhadap Total Pemberitaan Sektor KP.....	32
Tabel 7. Rekapitulasi Jumlah Pemberitaan Ditjen PDSPKP Berdasarkan Tone Pemberitaan	33
Tabel 8. Ikhtisar Pencapaian Persentase Pemenuhan Dokumen Maturitas SPIP Ditjen PDSPKP.....	34
Tabel 9. Ikhtisar Pencapaian Indeks Profesionalitas ASN lingkungan Setditjen PDSPKP	36
Tabel 10. Ikhtisar Pencapaian Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di lingkungan Setditjen PDSPKP.....	38
Tabel 11. Ikhtisar Pencapaian Pencapaian Persentase Penyelesaian Temuan BPK Di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (%).....	41
Tabel 12. Ikhtisar Pencapaian Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di lingkungan Setditjen PDSPKP	42

Tabel 13. Ikhtisar Pencapaian Persentase Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Ditjen PDSPKP yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar...	44
Tabel 14. Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Setditjen PDSPKP.....	45
Tabel 15. Ikhtisar Pencapaian Nilai Kinerja Anggaran (NKA) di Lingkungan Sekretariat Ditjen PDSPKP.....	47
Tabel 16. Ikhtisar Pencapaian Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Ditjen PDSPKP	49
Tabel 17. Ikhtisar Pencapaian Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Setditjen PDSPKP	51
Tabel 18. Ikhtisar Pencapaian Persentase Lembar Kerja Data Produksi yang Tervalidasi Setditjen PDSPKP	54
Tabel 19. Ikhtisar Pencapaian Persentase permasalahan hukum yang ditangani Lingkup Ditjen PDSPKP	56
Tabel 20. Ikhtisar pencapaian nilai penilaian mandiri pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik (PEKPP) Lingkup Ditjen PDSPKP .	58
Tabel 21. Ikhtisar Pencapaian Persentase Pemenuhan Layanan Internal/Overhead lingkup Ditjen PDSPKP	60
Tabel 22. Ikhtisar Pencapaian Jumlah Pemenuhan Layanan Perkantoran lingkup Ditjen PDSPKP	61



DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Jumlah Unit Kerja Sekretariat Ditjen PDSPKP Tahun 2023.....	3
Gambar 2. Dashboard NKO pada SAPK Unit Kerja Sekretariat Ditjen PDSPKP Triwulan IV Tahun 2023	9
Gambar 3. Pemberkasan Arsip Usul dan Pembahasan Akun eLayar Timja Lingkup Ditjen PDSPKP.....	19
Gambar 4. Workshop Pengarusutamaan Gender (PUG) bekerja sama dengan GISLI	27
Gambar 5. Rapat Pembahasan Technical Agreement dengan Swiss Import Promotion Program (SIPPO).....	29
Gambar 6. The 26th Fisheries Consultative Group of the ASEAN - SEAFDEC Strategic Partnership (FCG-ASSP)	30
Gambar 7. Keikutsertaan Penginputan kertas kerja maturitas SPIP	34
Gambar 8. Monitoring dan Evaluasi Kinerja dan Disiplin Pegawai Triwulan III dan IV Tahun 2023 lingkup Ditjen PDSPKP	37
Gambar 9. Workshop Pelaporan Kinerja Ditjen PDSPKP	38
Gambar 10. <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) Rancangan Awal Teknokratik Ditjen PDSPKP	39
Gambar 11. <i>Benchmarking</i> SAKIP dan RB Tematik KKP	39
Gambar 12. Verifikasi data Capaian kinerja Ditjen PDSPKP Periode Triwulan III Tahun 2023.....	40
Gambar 13. Kegiatan Pemabahasan NKA KKP	49
Gambar 14. Bimbingan Teknis Penerapan Komunikasi Inklusif dan Memaksimalkan Budaya Pelayanan Prima Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan	59
Gambar 15. Forum Konsultasi Publik, tanggal 13 Desember 2023.....	59



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Sekretariat Ditjen PDSPKP Tahun 2023

Lampiran 2. Realisasi Anggaran Sekretariat Ditjen PDSPKP pada Triwulan II Tahun
2023 berdasarkan Aplikasi Omspan Kemenkeu



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025 telah menetapkan salah satu misi yang terkait dengan KKP yaitu “Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri, Maju, Kuat, dan Berbasis Kepentingan Nasional”. Hal tersebut dilakukan dengan menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah, meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, serta membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. Keseluruhan pembangunan ini dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan menjunjung aspek akuntabilitas dan transparansi sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, pada Triwulan IV tahun 2023 telah melakukan penyusunan Laporan Kinerja (LKj). Laporan ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini menggambarkan pencapaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan pada Triwulan IV Tahun 2023 sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan perikanan

Sekretariat Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan selama periode tahun 2023.

B. Maksud dan Tujuan

Tujuan penyusunan LKj Setditjen PDSPKP Triwulan IV tahun 2023 adalah untuk memberikan informasi atas kinerja yang terukur dan yang telah dilaksanakan kepada pemberi mandat. Pada laporan ini dirumuskan suatu kesimpulan atau rekomendasi kebijakan yang dapat menjadi salah satu bahan masukan dan referensi dalam menetapkan kebijakan pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan ke depan sebagai bentuk upaya perbaikan berkesinambungan bagi Setditjen PDSPKP untuk meningkatkan kinerjanya.

C. Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, kedudukan Ditjen PDSPKP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.

Dalam menyelenggarakan program dan kegiatan, Sekretariat Direktorat Jenderal PDSPKP mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP.

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, Sekretariat Ditjen PDSPKP menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan data dan kinerja, penyiapan bahan pimpinan, serta pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
2. Koordinasi dan pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia aparatur, penataan organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi;
3. Koordinasi penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan advokasi hukum, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum;

4. Koordinasi dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerja sama; dan
5. Koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan, barang milik negara, dan ketatausahaan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Nota Dinas Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi Nomor 1133/SJ.3/OT.210/VII/2023 tanggal 21 Juli 2023, telah disepakati Tim Kerja lingkup Ditjen PDSPKP. Adapun Tim Kerja lingkup Setditjen PDSPKP sebagai berikut :

1. Tim Kerja Program;
2. Tim Kerja Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi;
3. Tim Kerja Hukum;
4. Tim Kerja Kerjasama dan Humas;
5. Tim Kerja Data dan Layanan Publik;
6. Tim Kerja Pengendalian Internal;
7. Tim Kerja Pengelolaan BMN dan PBJ; dan
8. Tim Kerja Kearsipan dan layanan Perkantoran.

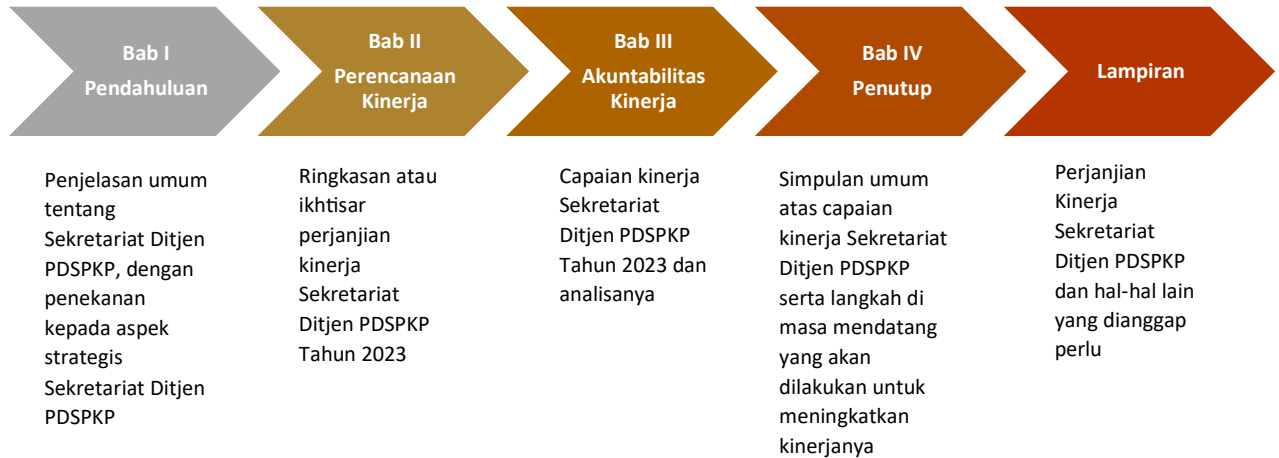
D. Sumber Daya Manusia



Gambar 1 Jumlah Unit Kerja Sekretariat Ditjen PDSPKP Tahun 2023

E. Sistematika Penyajian LKj

Laporan kinerja Sekretariat Ditjen PDSPKP mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.





BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2020-2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran visi Indonesia 2045 untuk “Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Pencapaian visi tersebut dilakukan melalui transformasi ekonomi yang didukung oleh hilirisasi industri dengan memanfaatkan sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi dan reformasi birokrasi. Pidato Presiden pada saat pelantikan tanggal 20 Oktober 2019 menyampaikan fokus-fokus pembangunan dalam lima tahun ke depan meliputi pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), pembangunan infrastruktur, penyederhanaan birokrasi dan transformasi ekonomi.

Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan memiliki peran strategis untuk mendukung fokus program utama presiden tersebut di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan yang selanjutnya dituangkan dalam dokumen perencanaan dengan berbagai upaya akselerasi pencapaian. Diharapkan pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan pada gilirannya mampu meningkatkan kontribusinya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya akan memperkuat struktur ekonomi nasional yang kokoh dan maju serta turut serta dalam mewujudkan sumber daya ikan yang berkelanjutan.

Untuk menjalankan peran strategis tersebut, visi pembangunan Ditjen PDSPKP tahun 2020-2024 ditetapkan sebagai berikut: “Mewujudkan Pengelolaan Perikanan dan Kelautan yang Berkelanjutan untuk Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri” dalam rangka mendukung terwujudnya

Visi Presiden dan Wakil Presiden dalam urusan Kelautan dan Perikanan. Dalam mencapai visi tersebut, Sekretariat Ditjen PDSPKP menjalankan misi Ditjen PDSPKP yaitu melaksanakan tata Kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya lingkup Ditjen PDSPKP.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja berisi tentang pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan Kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Perjanjian kinerja Sekretariat Ditjen PDSPKP pada tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 1. di bawah ini.

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Sekretariat Ditjen PDSPKP Tahun 2023

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan				
1	Terlaksananya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di Lingkungan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (%)	100
		2	Nilai pengawasan kearsipan di Unit Kearsipan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Nilai)	75
		3	Persentase dokumen Kerjasama yang disusun/ditindaklanjuti oleh Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (%)	80
		4	Rasio jumlah pemberitaan negatif bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan terhadap total pemberitaan sektor kelautan dan perikanan (%)	≤5

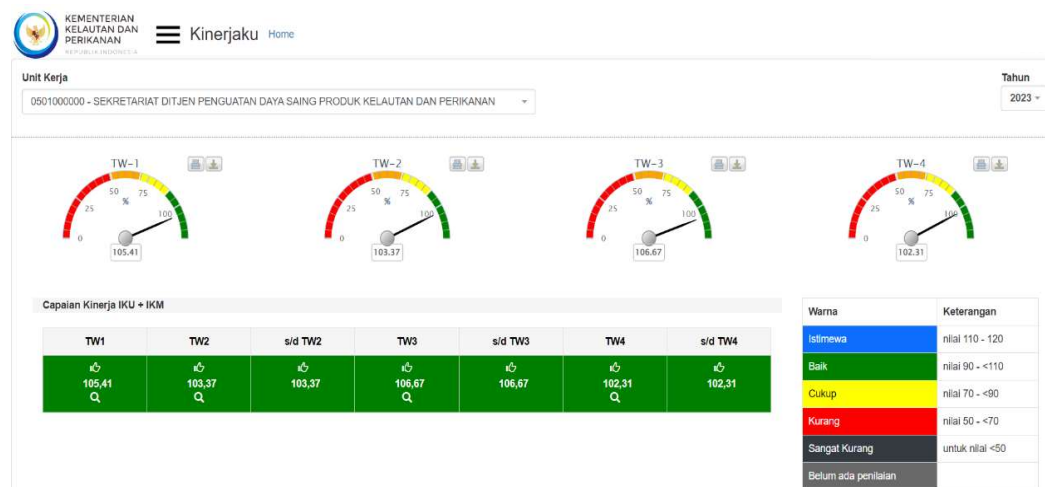
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	
	5	Persentase pemenuhan dokumen Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (%)	100
	6	Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Indeks)	83,2
	7	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Nilai)	80,5
	8	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (%)	100
	9	Persentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (%)	75
	10	Persentase Unit kerja di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan yang menerapkan manajemen pengetahuan terstandar (%)	92
	11	Nilai Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Nilai)	93,75
	12	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Nilai)	86
	13	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Direktorat	77,5

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
			Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (%)	
		14	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (%)	77,5
		15	Persentase lembar kerja data produksi Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan yang tervalidasi (%)	100
		16	Persentase Permasalahan Hukum yang ditangani Lingkup Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (%)	100
		17	Nilai Penilaian Mandiri Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) Lingkup Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Nilai)	4,1
2	Terwujudnya Layanan Sarana dan Prasarana Internal lingkup Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan yang efisien, efektif dan berorientasi pada layanan prima	18	Persentase pemenuhan layanan internal/ <i>overhead</i> lingkup Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (%)	100
3	Terwujudnya pelaksanaan layanan Perkantoran lingkup Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan yang efisien, efektif dan berorientasi pada layanan prima	19	Jumlah pemenuhan layanan perkantoran lingkup Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Bulan)	12

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Pada tahun 2023, Sekretariat Ditjen PDSPKP telah menetapkan tiga sasaran kegiatan dan 19 indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Setditjen PDSPKP pada Triwulan IV sebesar 102,31. NKO tersebut merupakan gambaran nilai kinerja suatu organisasi secara terukur keseluruhan yang bisa diperoleh dari Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK). *Dashboard* NKO pada SAPK Unit Kerja Sekretariat Ditjen PDSPKP Triwulan IV Tahun 2023 sebagaimana Gambar 2.



Gambar 2 Dashboard NKO pada SAPK Unit Kerja Sekretariat Ditjen PDSPKP Triwulan IV Tahun 2023

Pengukuran capaian kinerja Sekretariat Ditjen PDSPKP Triwulan IV Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi indikator kinerja sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Sekretariat Ditjen PDSPKP Triwulan IV Tahun 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target		Realisasi TV IV 2023	% Terhadap Target TW IV	% Terhadap Target 2023		
		Tahun 2023	TW IV 2023					
1	Terlaksananya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di Lingkungan Ditjen PDSPKP	1	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (%)	100	100	100	100	
		2	Nilai pengawasan kearsipan di Unit Kearsipan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Nilai)	75	75	97,66	130,21	130,21
		3	Persentase dokumen Kerjasama yang disusun/ditindaklanjuti oleh Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (%)	80	80	90,73	113,41	113,41
		4	Rasio jumlah pemberitaan negatif bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan terhadap total pemberitaan sektor kelautan dan perikanan (%)	≤5	≤5	0	120	120
		5	Persentase pemenuhan dokumen Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (%)	100	100	100	100	100
		6	Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Indeks)	83,2	83,2	91,23	109,65	109,65
		7	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Nilai)	80,5	80,5	83,8	104,10	104,10
		8	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing	100	100	100	100,00	100

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target		Realisasi TV IV 2023	% Terhadap Target TW IV	% Terhadap Target 2023
		Tahun 2023	TW IV 2023			
	Produk Kelautan dan Perikanan (%)					
	9 Persentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (%)	75	75	97,62	130,16	130,16
	10 Persentase Unit kerja di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan yang menerapkan manajemen pengetahuan terstandar (%)	92	92	133,33	144,92	144,92
	11 Nilai Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Nilai)	93,75	93,75	89,37	95,33	95,33
	12 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Nilai)	86	86	85,54	99,47	99,47
	13 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (%)	77,5	77,5	79,69	102,83	102,83
	14 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (%)	77,5	77,5	97,5	125,81	125,81
	15 Persentase lembar kerja data produksi Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan yang tervalidasi (%)	100	100	100	100,00	100

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target		Realisasi TV IV 2023	% Terhadap Target TW IV	% Terhadap Target 2023		
		Tahun 2023	TW IV 2023					
		16	Persentase Permasalahan Hukum yang ditangani Lingkup Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (%)	100	100	100	100,00	100
		17	Nilai Penilaian Mandiri Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) Lingkup Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Nilai)	4,1	4,1	4,31	105,12	105,12
2	Terwujudnya Layanan Sarana dan Prasarana Internal lingkup Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan yang efisien, efektif dan berorientasi pada layanan prima	18	Persentase pemenuhan layanan internal/ <i>overhead</i> lingkup Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (%)	100	100	100	100,00	100
3	Terwujudnya pelaksanaan layanan Perkantoran lingkup Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan yang efisien, efektif dan berorientasi pada layanan prima	19	Jumlah pemenuhan layanan perkantoran lingkup Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Bulan)	12	3	3	100.00	100

B. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Evaluasi dan analisis capaian kinerja menjelaskan realisasi indikator kinerja, permasalahan dan kendala yang dihadapi serta upaya perbaikan yang dilakukan ke depan dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan kinerja di lingkungan Sekretariat Ditjen PDSPKP. Analisis untuk setiap sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan 1.

Terlaksananya Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Lingkungan Ditjen PDSPKP

1. Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penguatan Daya Saing Produk KP adalah sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 84 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 84 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023, program penyusunan peraturan perundang-undangan lingkup Ditjen PDSPKP tahun 2023 meliputi:

1. Peraturan Menteri tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2016 tentang Pemberlakuan SNI Tuna Dalam Kemasan Kaleng dan SNI Sarden dan Makarel dalam Kemasan Kaleng secara Wajib;
2. Peraturan Menteri tentang Kemitraan Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan;
3. Peraturan Menteri tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 60/PERMEN-KP/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Sektor Kelautan dan Perikanan;

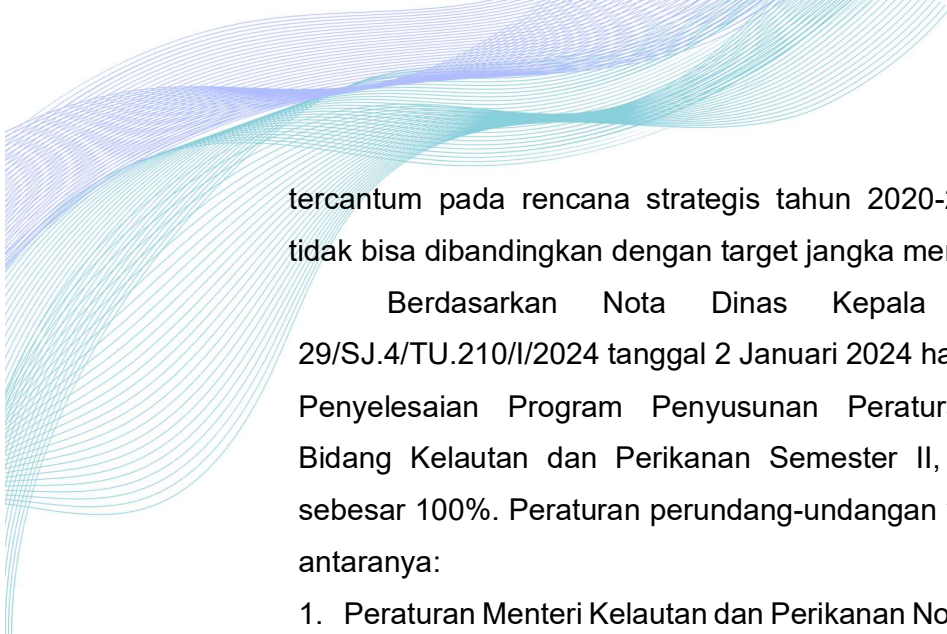
4. Peraturan Menteri tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37/PERMENKP/2016 tentang Skala Usaha Pengolahan Ikan;
5. Peraturan Menteri tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan;
6. Peraturan Menteri tentang Standar Kualitas Hasil Kerja Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan; dan
7. Peraturan Menteri tentang Pengelolaan Sistem Distribusi Ikan.

Capaian diperoleh dari perhitungan jumlah peraturan perundang-undangan yang diselesaikan (penyampaian permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Kementerian Hukum dan HAM atau penyampaian penetapan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Menteri) hingga 31 Desember 2023, dibandingkan dengan jumlah peraturan perundang-undangan yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023.

Tabel 3. Ikhtisar Pencapaian Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di lingkungan Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target			Realisasi TW IV 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi TW IV 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi TW IV 2022-TW I 2023 (%)
	Tahun 2023	TW IV 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW IV 2023	Tahun 2024		
Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di lingkungan Ditjen PDSPKP (%)	100	100	-	100	100	100	-	100	-

Pada tahun 2023 capaian Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di lingkungan Ditjen PDSPKP sebesar 100, capaian dimaksud setara dengan 100% terhadap target tahun 2023 sebesar 100. Indikator kinerja ini merupakan indikator baru dan belum



tercantum pada rencana strategis tahun 2020-2024 sehingga capaiannya tidak bisa dibandingkan dengan target jangka menengah.

Berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Hukum Nomor 29/SJ.4/TU.210/I/2024 tanggal 2 Januari 2024 hal Capaian IKU Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kelautan dan Perikanan Semester II, capaian Ditjen PDSPKP sebesar 100%. Peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan di antaranya:

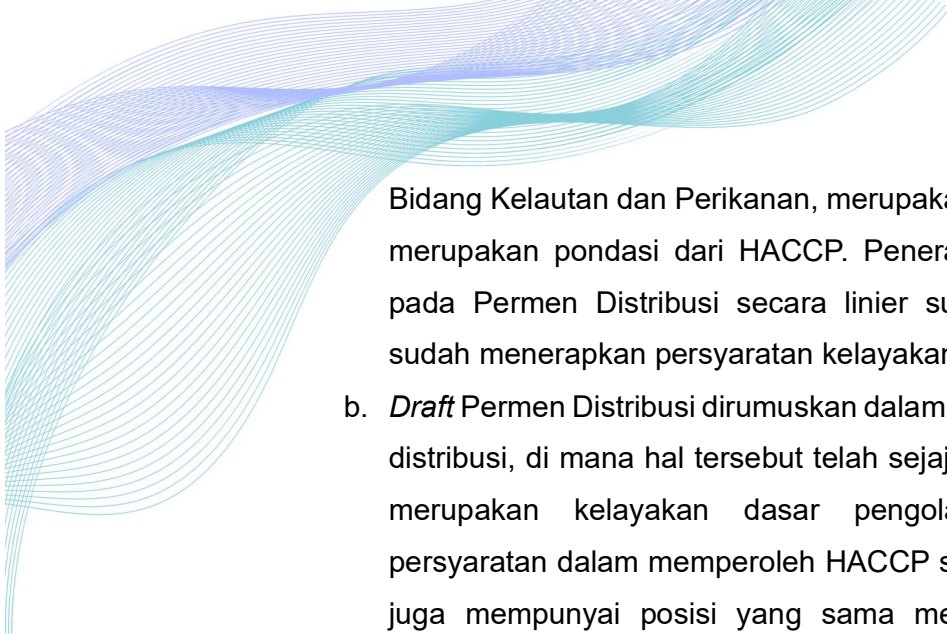
1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2009 Tentang Skala Usaha di Bidang Pembudidayaan Ikan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2014 Tentang Usaha Pembudidayaan Ikan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN- KP/2016 Tentang Tata Cara Penetapan Faktor X Tarif Jasa Pengadaan Es Di Pelabuhan Perikanan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37/PERMEN-KP/2016 Tentang Skala Usaha Pengolahan Ikan, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMENKP/2018 Tentang Master Plan Teknologi Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2018 – 2022;
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan;
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Standar Kualitas Hasil Kerja dan Pedoman Penilaian Kualitas Hasil Kerja Analis Pasar Hasil Perikanan;
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Kemitraan pada Bidang Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Tuna dalam Kemasan Kaleng dan Standar Nasional Indonesia Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng Secara Wajib; dan

6. Peraturan Menteri Nomor 46 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Kredit Usaha Rakyat Sektor Kelautan dan Perikanan.

Pada triwulan IV, telah dilakukan penyampaian Rancangan Peraturan Menteri tentang Pengelolaan Sistem Distribusi Ikan ke Plh. Sekretaris Jenderal KKP melalui Nota Dinas 3637/DJPDSPKP.0/HK.110/X/2023 tanggal 27 Oktober 2023. Selain itu telah dilakukan beberapa kali rapat pembahasan rancangan peraturan dimaksud, salah satunya rapat yang diadakan pada tanggal 20 November 2023 di Ruang Rapat Cakalang, GMB III lantai I, dengan beberapa notulensi sebagai berikut:

1. Ketentuan menimbang dikembalikan sesuai amanah Permen KP nomor 58 tahun 2021 tentang Sistem Logistik Ikan Nasional sehingga untuk kalimat "... serta dalam rangka menjamin mutu dan keamanan hasil perikanan selama proses distribusi ke negara tujuan ekspor" disepakati dihapus. Hal ini, karena pengaturan ekspor sudah diatur dalam penyempurnaan PP nomor 5 tahun 2021;
2. Terdapat 2 alternatif penguatan pengaturan syarat konsepsi HACCP yaitu:
 - a. Menambahkan konsepsi HACCP antara pasal 10 dengan pasal 11 yaitu "Selain standar teknik penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), standar teknik penyimpanan dalam penyusunan CDIB juga harus menerapkan konsepsi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)".
 - b. Menambahkan pemeriksaan konsepsi HACCP dalam tugas kewenangan BP2MHKP dalam penerbitan SPDI yang dituangkan dalam pasal 18 ayat (2) yaitu:

" Untuk Pelaku Usaha penyimpanan, selain pemeriksaan penerapan CDIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan melakukan pemeriksaan penerapan konsepsi *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP)"
3. Perwakilan ditjen PDSPKP berkeberatan terhadap penambahan konsepsi HACCP dengan alasan:
 - a. Persyaratan standar yang dijabarkan di *draft* Permen Distribusi sudah mengacu pada PP 27 tahun 2021 tentang: Penyelenggaraan

- 
- Bidang Kelautan dan Perikanan, merupakan persyaratan dasar yang merupakan pondasi dari HACCP. Penerapan persyaratan standar pada Permen Distribusi secara linier sudah menjelaskan bahwa sudah menerapkan persyaratan kelayakan dasar pada HACCP;
- b. *Draft* Permen Distribusi dirumuskan dalam kerangka kelayakan dasar distribusi, di mana hal tersebut telah sejajar dengan SKP yang juga merupakan kelayakan dasar pengolahan. SKP merupakan persyaratan dalam memperoleh HACCP sehingga SPDI diharapkan juga mempunyai posisi yang sama menjadi persyaratan dalam memperoleh HACCP;
 - c. Salah satu isu strategis yang diangkat dalam penyusunan SPDI adalah semangat kemudahan berusaha tanpa meniadakan prinsip penerapan mutu. Penerapan HACCP secara lengkap pada penyimpanan (tanpa kegiatan pengolahan) akan memberatkan pelaku usaha;
 - d. Hasil uji Petik di lapangan menyatakan bahwa Pelaku penyimpanan (tanpa kegiatan pengolahan) sangat keberatan dengan penerapan persyaratan dasar kelayakan pengolahan, meskipun mereka tidak melakukan pengolahan sehingga dengan diterapkan HACCP dikuatirkan akan memberatkan pelaku usaha.
4. Pengaturan keberterimaan sertifikat kelayakan pengolahan akan diatur dan dituangkan dalam rancangan permen dimaksud;
 5. Perwakilan Ditjen PDSPKP bersepakat untuk membawa pengaturan mengenai konsesi HACCP sebagai persyaratan dalam Penerbitan SPDI untuk mendapatkan arahan pimpinan sebelum melanjutkan rapat.

Berdasarkan hal tersebut dapat disampaikan bahwa 7 (tujuh) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang diajukan Ditjen PDSPKP dapat dianggap selesai, 6 (enam) diantaranya telah diundangkan, 1 (satu) Rancangan Peraturan Menteri tentang Pengelolaan Sistem Distribusi Ikan Telah disampaikan ke Sekretariat Jenderal dan dilakukan pembahasan, di mana rencananya akan dilakukan harmonisasi pada bulan Januari 2024.

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja ini, Setditjen PDSPKP telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 911.929.000,00. Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp 911.332.224,00 (99,93%). Dalam hal ini terdapat efisiensi anggaran yang dapat terlihat dari persentase pencapaian indikator kinerja sebesar 100% lebih besar daripada persentase realisasi anggaran yaitu sebesar 99,93%.

2. Nilai Pengawasan Kearsipan di Unit Kearsipan Ditjen PDSPKP

Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan. Arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara, pemerintah daerah, dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara merupakan memori, acuan dan bahan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sehingga perlu dilakukan usaha penyelamatan secara terpadu, sistematis dan komprehensif sehingga diperlukan pengawasan kearsipan sesuai dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan.

Tabel 4. Ikhtisar Pencapaian Nilai Pengawasan Kearsipan di lingkungan Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target			Realisasi TW IV 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi TW IV 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi TW IV 2022-TW I 2023 (%)
	Tahun 2023	TW IV 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW IV 2023	Tahun 2024		
Nilai pengawasan kearsipan di Unit Kearsipan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Nilai)	75	75	-	97,66	130,21	130,21	-	85,40	14,36

Pada tahun 2023 Capaian nilai pengawasan kearsipan di lingkungan Ditjen PDSPKP sebesar 97,66, capaian dimaksud setara dengan 130,21% terhadap target tahun 2023 sebesar 75. jika dibandingkan dengan nilai pengawasan kearsipan di lingkungan Ditjen PDSPKP tahun 2022 sebesar 85,40, maka capaian sampai dengan triwulan IV tahun 2023 mengalami

kenaikan sebesar 14,36%. Indikator kinerja ini merupakan indikator baru dan belum tercantum pada rencana strategis tahun 2020-2024 sehingga capaiannya tidak bisa dibandingkan dengan target jangka menengah.

Adapun upaya yang telah dilakukan Setditjen PDSPKP untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pengawasan kearsipan antara lain:

- a. Keikutsertaan pada Pembahasan Pengelolaan Kearsipan Pada Masing-masing Unit Organisasi di Lingkungan KKP tahun 2024 pada tanggal 21 November 2023;
- b. Keikutsertaan pada Reviu Analisa Beban Kerja Jabatan Fungsional Arsiparis KKP pada Tanggal 21 November 2023;
- c. Pendampingan Pemusnahan Arsip BBP3KP tanggal 27 Desember 2023 di Indoarsip Cikarang;
- d. Keikutsertaan pada kegiatan penilaian indikator kinerja Nilai Pengawasan Kearsipan di Unit Kearsipan Ditjen PDSPKP yang telah dilaksanakan sejak periode Juli 2023 sampai dengan Desember 2023.



Gambar 3 Pemberkasan Arsip Usul dan Pembahasan Akun eLayar Timja Lingkup Ditjen PDSPKP

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja ini Setditjen PDSPKP telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp945.767.000,00. Realisasi anggaran sampai periode Triwulan IV sebesar Rp944.804.620,00. Realisasi anggaran ini setara dengan 99,90% terhadap total alokasi anggaran. Dalam hal ini terdapat efisiensi anggaran yang dapat terlihat dari persentase pencapaian indikator kinerja sebesar 100% lebih besar daripada persentase realisasi anggaran yaitu sebesar 99,90%.

3. Persentase Dokumen Kerjasama yang Disusun/Ditindaklanjuti oleh Ditjen PDSPKP

Dokumen kerja sama adalah dokumen formal pengikatan hukum terhadap rencana kerja sama dengan mitra kerja sama baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang dilaksanakan oleh Ditjen PDSPKP. Ada beberapa jenis kerja sama yaitu kerja sama antar Lembaga, kerja sama bilateral, kerja sama regional dan multilateral.

Tabel 5. Ikhtisar Pencapaian Persentase Dokumen Kerjasama yang Disusun/Ditindaklanjuti oleh Ditjen PDSPKP

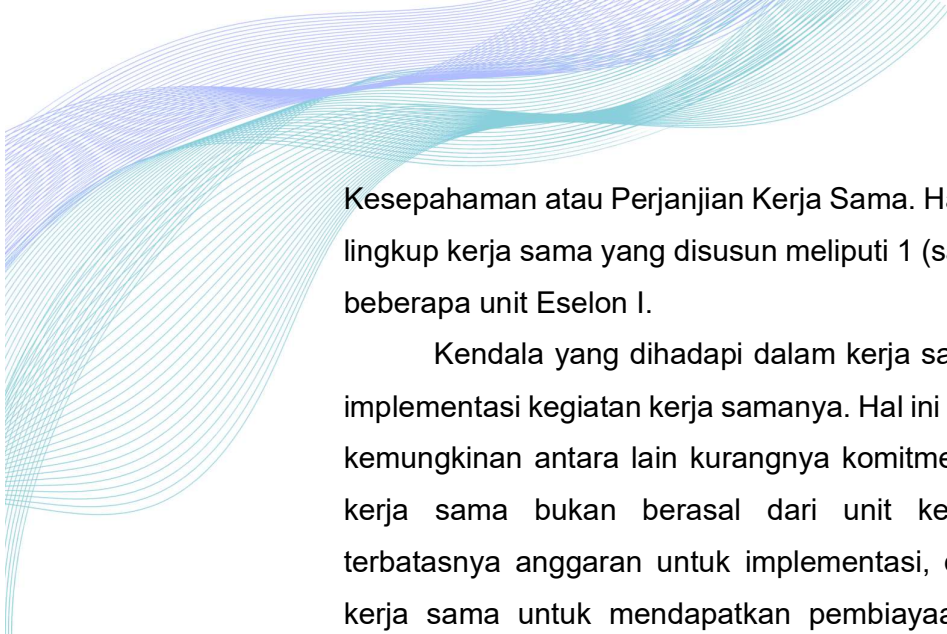
Indikator Kinerja	Target			Realisasi TW IV 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi TW IV 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi TW IV 2022-TW I 2023 (%)
	Tahun 2023	TW IV 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW IV 2023	Tahun 2024		
Persentase dokumen Kerjasama yang disusun/ditindaklanjuti oleh Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (%)	80	80	-	90,73	113,41	113,41	-	96,44	-5,92

Pada tahun 2023 Persentase Dokumen Kerjasama yang Disusun/Ditindaklanjuti oleh Ditjen PDSPKP sebesar 90,73, capaian dimaksud setara dengan 113,41% terhadap target tahun 2023 sebesar 80. Jika dibandingkan dengan Persentase Dokumen Kerjasama yang Disusun/Ditindaklanjuti oleh Ditjen PDSPKP tahun 2022 sebesar 96,44, maka capaian sampai dengan triwulan IV tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 5,92%. Indikator kinerja ini merupakan indikator baru dan belum tercantum pada rencana strategis tahun 2020 - 2024 sehingga capaiannya tidak bisa dibandingkan dengan target jangka menengah.

Setditjen PDSPKP telah melakukan beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator kinerja ini antara lain sebagai berikut:

a. Kerja Sama Antar Lembaga

Kerja Sama Antar Lembaga merupakan kerja sama yang dijalin antara KKP dengan Kementerian/Lembaga lainnya, ormas asing dan swasta. Bentuk kerja sama dapat berupa Kesepakatan Bersama, Nota



Kesepahaman atau Perjanjian Kerja Sama. Hal ini tergantung dari ruang lingkup kerja sama yang disusun meliputi 1 (satu) unit Eselon I saja atau beberapa unit Eselon I.


Kendala yang dihadapi dalam kerja sama antar lembaga adalah implementasi kegiatan kerja samanya. Hal ini disebabkan oleh beberapa kemungkinan antara lain kurangnya komitmen dari para pihak, inisiasi kerja sama bukan berasal dari unit kerja yang membutuhkan, terbatasnya anggaran untuk implementasi, dan ketergantungan mitra kerja sama untuk mendapatkan pembiayaan sepenuhnya dari KKP dalam implementasi kerja sama.

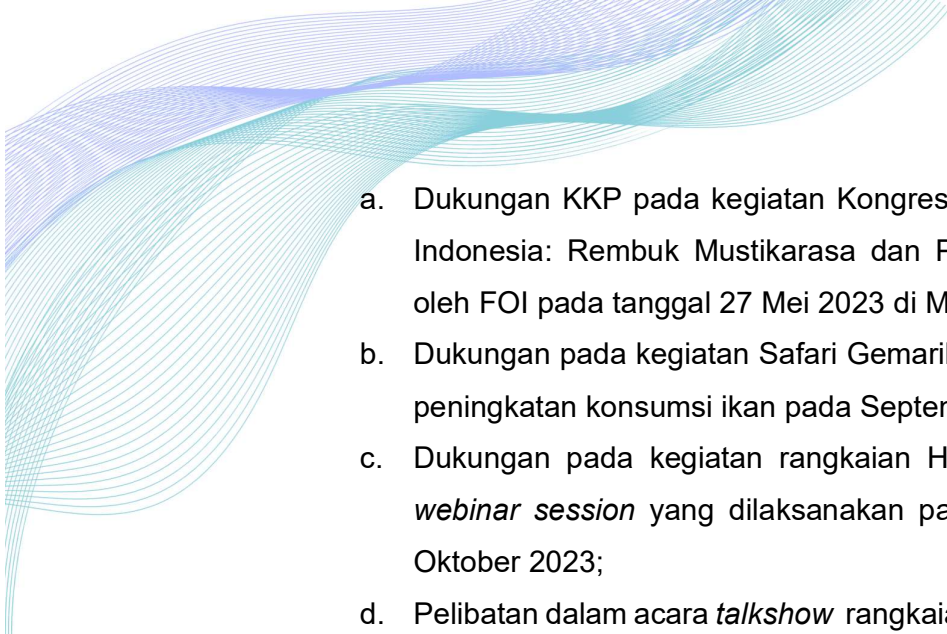
Dalam rangka mengantisipasi kendala dimaksud maka pada saat penyusunan perjanjian kerja sama, dilakukan penyusunan rencana aksi kegiatan implementasi yang menjadi lampiran dokumen perjanjian kerja sama. Di samping itu dilaksanakan evaluasi kerja sama untuk mengetahui perkembangan implementasinya.

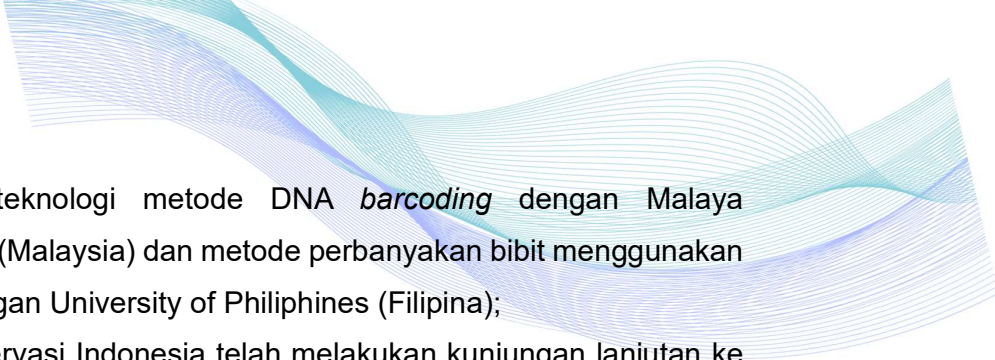
Dalam pelaksanaan kerja sama antar lembaga, Ditjen PDSPKP selain melakukan inisiasi perjanjian kerja sama juga ikut terlibat dalam dalam penyusunan Kesepakatan Bersama yang dikoordinasikan oleh Biro Perencanaan.

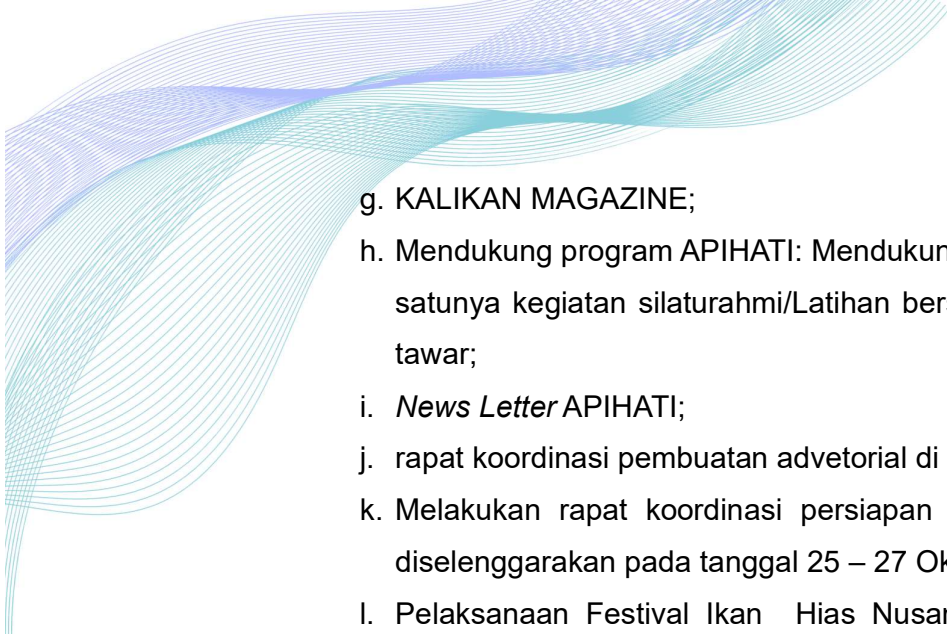
Berikut merupakan kegiatan implementasi kerja sama antar lembaga yang dilaksanakan sampai dengan triwulan IV tahun 2023.

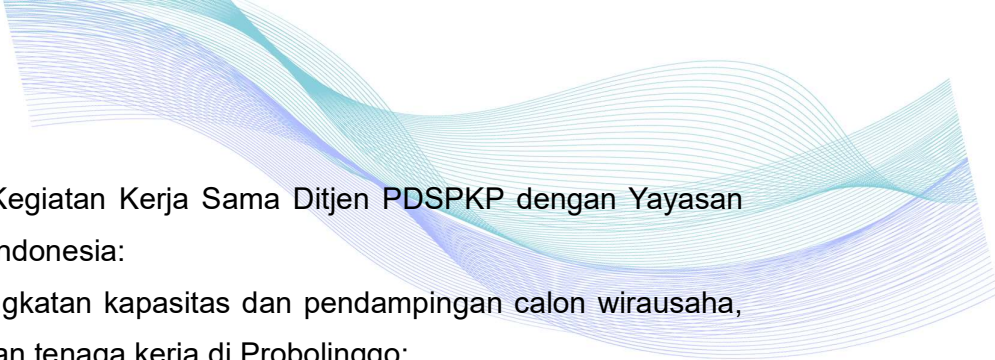

1. Implementasi Kegiatan Kerja Sama Ditjen PDSPKP dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK):
 - a. Asistensi kepada Unit Pengolahan Ikan Skala Menengah dan Besar untuk membantu melakukan perbaikan kinerja pelaporan PROPER KLHK dengan hasil adendum penilaian peringkat kinerja berdasarkan Kepmen LHK No. SK.386/MENLHK/SETJEN /KUM.1/4/2023;
 - b. Evaluasi dan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama;
 - c. Pertukaran data perkembangan status PROPER bagi UPI produk kelautan dan perikanan;

- 
- d. *Update* data calon kandidat UPI Proper Hijau (SK Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan tanggal 29 September 2023).
 2. Implementasi Kegiatan Kerja Sama Ditjen PDSPKP dengan Kementerian Kesehatan:
 - a. Sosialisasi Gemarikan dan Germas kepada masyarakat di Tabanan dan Musi Rawas;
 - b. Penyusunan buku dan juknis;
 - c. *Business Inovation Challenge*;
 - d. Kolaborasi program dan kegiatan pada acara puncak Hari Ikan Nasional (Harkannas) 2023.
 3. Implementasi Kegiatan Kerja Sama Ditjen PDSPKP dengan Grab Teknologi Indonesia pada Pelibatan pada Hari Ikan Nasional tanggal 21 November 2023;
 4. Implementasi Kegiatan Kerja Sama Ditjen PDSPKP dengan Gojek pada Pelibatan pada Hari Ikan Nasional tanggal 21 November 2023;
 5. Implementasi Kegiatan Kerja Sama Ditjen PDSPKP dengan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Kementerian Perdagangan:
 - a. Pemetaan calon lokasi dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang Komoditas Ikan dan Rumput Laut;
 - b. Sosialisasi dan penguatan kelembagaan SRG ikan dan rumput laut;
 - c. Pendampingan kelembagaan SRG;
 - d. Pemanfaatan CS sebagai SRG ikan dan rumput laut;
 - e. Identifikasi dan pendampingan rencana implementasi Sistem Resi Gudang (SRG);
 - f. Sosialisasi Sistem Resi Gudang (SRG) terhadap pelaku usaha perikanan/UPI;
 - b. Pendampingan persiapan implementasi SRG;
 - b. Koordinasi implementasi Sistem Resi Gudang (SRG).
 6. Implementasi Kegiatan Kerja Sama Ditjen PDSPKP dengan Yayasan Lumbung Pangan (FOI):

- 
- a. Dukungan KKP pada kegiatan Kongres II Jaringan Bank Pangan Indonesia: Rembuk Mustikarasa dan Pasar Rakyat Mustikarasa oleh FOI pada tanggal 27 Mei 2023 di Museum Bahari Jakarta;
 - b. Dukungan pada kegiatan Safari Gemarikan di daerah *Pilot Project* peningkatan konsumsi ikan pada September 2023 di Yogyakarta;
 - c. Dukungan pada kegiatan rangkaian Hari Ikan Nasional melalui *webinar session* yang dilaksanakan pada bulan September dan Oktober 2023;
 - d. Pelibatan dalam acara *talkshow* rangkaian Hari Ikan Nasional pada tanggal 20 November 2023.
7. Implementasi Kegiatan Kerja Sama Ditjen PDSPKP dengan Kementerian Koperasi dan UKM:
 - a. Identifikasi kebutuhan lembaga usaha;
 - b. Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Usaha Produk Kelautan dan Perikanan;
 8. Implementasi Kegiatan Kerja Sama Ditjen PDSPKP dengan Yayasan WWF antara lain:
 - a. Dukungan pada acara Hari Ikan Nasional untuk publikasi penggunaan bahan baku dan pemilihan menu ikan yang mengedepankan keberlanjutan. Dukungan dilaksanakan melalui *webinar series* menuju Hari Ikan Nasional 2023;
 - b. Direktur Pemasaran menjadi narasumber acara *talkshow* WWF " jika Cintamu sedalam lautan, pangan lautmu selezat cinta" tanggal 14 Oktober 2023.
 9. Implementasi Kegiatan Kerja Sama Ditjen PDSPKP dengan Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI):
 - a. Pelibatan MDPI sebagai narasumber pada acara *talkshow* dalam rangkaian Harkannas tanggal 20 November 2023;
 - b. Pelaksanaan monev lapangan kerja sama Ditjen PDSPKP dengan MDPI di Bali tanggal 21 Desember 2023.
 10. Implementasi Kegiatan Kerja Sama Ditjen PDSPKP dengan Yayasan Konservasi Cakrawala Indonesia:
 - a. Penelitian kultur jaringan rumput laut;

- 
- b. Transfer teknologi metode DNA *barcoding* dengan Malaya University (Malaysia) dan metode perbanyakan bibit menggunakan spora dengan University of Philipines (Filipina);
 - c. Tim Konservasi Indonesia telah melakukan kunjungan lanjutan ke Papua Barat Daya, Sumba Timur, Rote dan Kupang untuk melakukan pendalaman informasi mengenai kebutuhan pengembangan rumput laut di daerah serta potensi bisnis ramah terumbu karang lain. Pertemuan juga telah dilakukan dengan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - d. KI bersama YKAN menginisiasi dan memfasilitasi pertemuan antar mitra untuk koordinasi program, mengundang USAID, UNIDO, UNDP & GEF.
11. Implementasi Kegiatan Kerja Sama Ditjen PDSPKP dengan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB:
- a. Kunjungan mahasiswa Program Studi Teknologi Produksi dan Manajemen Perikanan Budidaya ke Cold Storage 1000 ton;
 - b. Pelibatan Ditjen PDSPKP pada pelaksanaan Festival Ikan nusantara (FINA) 2023 tanggal 6 - 8 Oktober 2023.
12. Implementasi Kegiatan Kerja Sama Ditjen PDSPKP dengan PT. Jelajah Inovasi Teknologi (KALIKAN):
- a. Pemasaran melalui media sosial instagram dan Tiktok di Tebet Raya No 37 Seperti: SOKAN SOWAN (Kunjungan ke pelaku ikan hias air tawar), SOKAN SOHIB (Informasi Tentang Ikan hias), SOKAN SOTAU (Tips dan Trik);
 - b. Melakukan kolaborasi media dengan nakama aquatic berupa liputan Docu-fish yaitu kunjungan ke pasar ikan, pelaku usaha dan penghobi ikan hias;
 - c. Kalikan Park: Proses *feasibility study* dan *design* oleh konsultan;
 - d. KALIKAN.ID: Promosi ikan hias melalui *web* kalikan;
 - e. Mendukung kegiatan kontes dan pameran ikan hias air tawar dari segi media partner;
 - f. Membuat event/lomba melalui Instagram KALIKAN kolaborasi dengan *Aquair "Social media Aquascape Photo Contest"*;

- 
- g. KALIKAN MAGAZINE;
 - h. Mendukung program APIHATI: Mendukung program APIHATI, salah satunya kegiatan silaturahmi/Latihan bersama kontes ikan hias air tawar;
 - i. *News Letter* APIHATI;
 - j. rapat koordinasi pembuatan advetorial di kalikan *magazine*;
 - k. Melakukan rapat koordinasi persiapan Kalikan expo yang akan diselenggarakan pada tanggal 25 – 27 Oktober 2023;
 - l. Pelaksanaan Festival Ikan Hias Nusantara tanggal 27 Oktober 2023;
 - m. Pelaksanaan bisnis forum pada saat Festival Ikan Nusantara.
13. Implementasi Kegiatan Kerja Sama Ditjen PDSPKP dengan Masyarakat Pengolahan Hasil Perikanan Indonesia (MPHPI) melalui Semnas Kelautan dan Perikanan ke-2 di Pekanbaru, Riau tanggal 8 – 9 November 2023;
 14. Implementasi Kegiatan Kerja Sama Ditjen PDSPKP dengan PT. Kereta Api Logistik:
 - a. Pelaksanaan FGD Fasilitasi Kemitraan Pengadaan, Penyimpanan dan Distribusi Hasil Perikanan di Kabupaten Pati dengan melibatkan KALOG sebagai TL kunjungan lapang ke Kabupaten Pati;
 - b. Kalog telah menyediakan Prototipe box berpendingin dan sedang disampaikan kepada tim manajemen kalog;
 - c. Pembukaan Gerai Layanan KALOG di Pati;
 - d. Koordinasi persiapan kegiatan peningkatan kapasitas operator logistik di Yogyakarta.
 15. Implementasi Kegiatan Kerja Sama Ditjen PDSPKP dengan BRIN melalui Pemanfaatan ruang Raiser 2 dan 3, gedung pengelola dan mushola;
 16. Implementasi Kegiatan Kerja Sama Ditjen PDSPKP dengan GISLI melalui *Workshop* Pengarusutamaan Gender tanggal 28 Oktober 2023 di PPN Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi;

- 
17. Implementasi Kegiatan Kerja Sama Ditjen PDSPKP dengan Yayasan Santripreneur Indonesia:
 - a. Bimtek Peningkatan kapasitas dan pendampingan calon wirausaha, wirausaha, dan tenaga kerja di Probolinggo;
 - b. Monev lapangan KKP ke Yayasan Santripreneur pada tanggal 29 November 2023.
 18. Implementasi Kegiatan Kerja Sama Ditjen PDSPKP dengan Pemerintah Kabupaten Wakatobi:
 - a. Pendampingan investasi kepada perusahaan/calon investor;
 - b. Proses penyusunan peluang investasi *ready to offer* oleh Dit Usaha dan Investasi;
 - c. Penyusunan profil pasar rumput laut.
 19. Implementasi Kegiatan Kerja Sama Ditjen PDSPKP dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) melalui pelaksanaan sosialisasi bursa pasar dan *bidfish* tanggal 7 November 2023 di Kabupaten Pati;
 20. Implementasi Kegiatan Kerja Sama Ditjen PDSPKP dengan PT. Jaring Aruna Dagang Indonesia:
 - a. Kunjungan lapang Ditjen PDSPKP ke lokasi kerja PT. JADI di Sidoarjo dan Bangkalan tanggal 14 – 16 November 2023;
 - b. Pelibatan pada Hari Ikan Nasional tanggal 19 – 21 November 2023;
 - c. Pemanfaatan coldstorage 1000 ton
 21. Implementasi Kegiatan Kerja Sama Ditjen PDSPKP dengan PT. Penanaman Nasional Madani:
 - a. Pelibatan pada *talkshow* Hari Ikan Nasional tanggal 20 November 2023;
 - b. Fasilitasi layanan pembiayaan usaha produktif sektor KP;
 - c. Peresmian kampung madani di kampung asap Rembang tanggal 21 Desember 2023.
 22. Implementasi Kegiatan Kerja Sama Ditjen PDSPKP dengan PT. Pindad International Logistik melalui pertemuan Dirjen PDSPKP dengan PT. Pindad di Bandung tanggal 21 Desember 2023;
 23. Implementasi Kegiatan Kerja Sama Ditjen PDSPKP dengan PERWARI:
- 

- a. Pelibatan Perwari pada Hari Ikan Nasional tanggal 21 November 2023;
 - b. Pelibatan Ditjen PDSPKP pada HUT Perwari tanggal 18 Desember 2023.
24. Implementasi Kegiatan Kerja Sama Ditjen PDSPKP dengan PT. Multidaya Teknologi Nusantara melalui pelibatan pada Hari Ikan Nasional tanggal 19 – 21 November 2023;

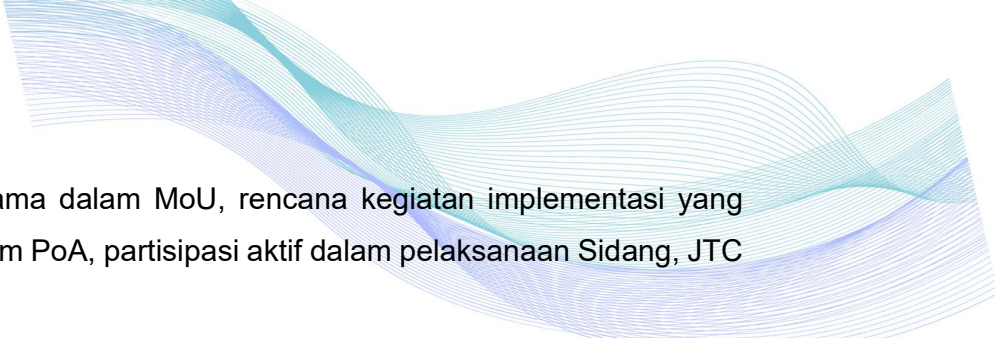


Gambar 4 Workshop Pengerusutamaan Gender (PUG) bekerja sama dengan GISLI

b. Kerja Sama Bilateral

Kerja sama bilateral merupakan kerja sama antara dua negara yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Kerja sama bilateral biasanya dituangkan dalam bentuk *Memorandum of Understanding* (MOU) antara kedua negara. Mempertimbangkan bahwa kerja sama yang terjalin diharapkan dapat diimplementasikan maka MoU ditindaklanjuti dengan penyusunan *Plan of Action* (PoA) dan pembentukan *Joint Technical Committee* (JTC) atau *Working Group* (WG) untuk pembahasan teknis pelaksanaan kerja sama.

Di Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagai *lead* dari semua kerja sama bilateral adalah Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri KKP. Inisiasi kerja sama baik dari Indonesia ataupun negara mitra akan dikoordinasikan oleh Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri dengan semua unit Eselon I lingkup KKP. Ruang lingkup kerja sama akan diusulkan oleh unit Eselon I lingkup KKP. Oleh karena itu *output* kerja sama bilateral dari unit Eselon I adalah berupa masukan/usulan ruang



lingkup kerja sama dalam MoU, rencana kegiatan implementasi yang dituangkan dalam PoA, partisipasi aktif dalam pelaksanaan Sidang, JTC ataupun WG.

Pada tahun 2023, target kerja sama bilateral yang akan diimplementasikan adalah kerja sama dengan 3 negara yaitu Amerika Serikat, Jepang, dan Swiss.

Pada triwulan IV tahun 2023, telah tercapai implementasi kerja sama dengan 3 negara yaitu Amerika Serikat, Jepang dan Swiss. Disamping itu terdapat tambahan kegiatan implementasi kerja sama dengan negara China, Thailand, Rusia dan Jerman. Berikut merupakan kegiatan implementasi kerja sama bilateral yang dilaksanakan pada periode Triwulan IV tahun 2023:

- 1) Melaksanakan Rapat Pembahasan Anti *Dumping* dan *Countervailing Duties* pada Oktober – Desember 2023;
- 2) Melaksanakan Rapat Perkembangan Perubahan Protokol IJEPA dengan Mr. Hajime dari Kedutaan Besar Jepang pada 2 November 2023;
- 3) Melakukan Kunjungan Kerja ke Jepang dalam rangka Pertemuan Intersesi Perundingan Protokol Perubahan Indonesia – Jepang Economic Partnership Agreement (IJEPA), Tokyo, pada 22 – 24 November 2023;
- 4) Melaksanakan Rapat Penyusunan *Draft Technical Arrangement* dengan SIPPO pada 10 Oktober 2023;
- 5) Melaksanakan Audiensi dengan Blueyou pada 1 Desember 2023;
- 6) Menghadiri ASEAN – China Seaweed Forum pada 10 – 13 November 2023 di China;
- 7) Melakukan Kunjungan Kerja ke China pada 10 – 11 Desember 2023;
- 8) Menghadiri *World Marine Equipment Conference* pada 12 – 15 Oktober 2023;
- 9) Rapat Inter-Kementerian Pembahasan Draft MOU RI - Rusia;
- 10) Melaksanakan Kunjungan Kerja ke Thailand pada 11 – 13 Desember 2023;

- 11) Menghadiri *Workshop Proyek Solar Cold Chains for Green Economy in Indonesia (SOCOOL)* pada 12 Desember 2023;
- 12) Pertemuan Penyusunan Keanggotaan Komite Pengarah dan Kelompok Kerja Proyek SOCOOL pada 19 Desember 2023;
- 13) Mengikuti *Cooperation and Capacity Building EFTA-Indonesia* pada 25 November – 2 Desember 2023;



Gambar 5 Rapat Pembahasan *Technical Agreement* dengan *Swiss Import Promotion Program (SIPPO)*

c. Kerja Sama Regional Dan Multilateral

Kerja sama regional merupakan kerja sama yang dilakukan oleh negara-negara yang berada di suatu kawasan tertentu yang biasanya berdekatan contohnya ASEAN, APEC, BIMP-EAGA dan lain - lain. Sedangkan kerja sama multilateral adalah kerja sama yang diselenggarakan oleh bangsa-bangsa di dunia tanpa memandang wilayah atau perkembangan perekonomian suatu negara contohnya WTO, PBB, FAO, IORA dan lain - lain.

Pelaksanaan kerja sama regional dan multilateral dilakukan melalui perundingan-perundingan rutin setiap tahun dengan mengangkat isu-isu strategis yang mengakomodir kepentingan dari negara-negara anggotanya sesuai dengan tujuan pembentukan dari organisasi regional dan multilateral tersebut. *Output* kerja sama regional dan multilateral dari unit Eselon I adalah berupa partisipasi aktif dalam forum perundingan regional dan multilateral dan memberikan masukan/usulan untuk

penyusunan kertas posisi Delegasi, bahan paparan Delegasi, usulan kegiatan implementasi, persiapan dan pelaksanaan kegiatannya.

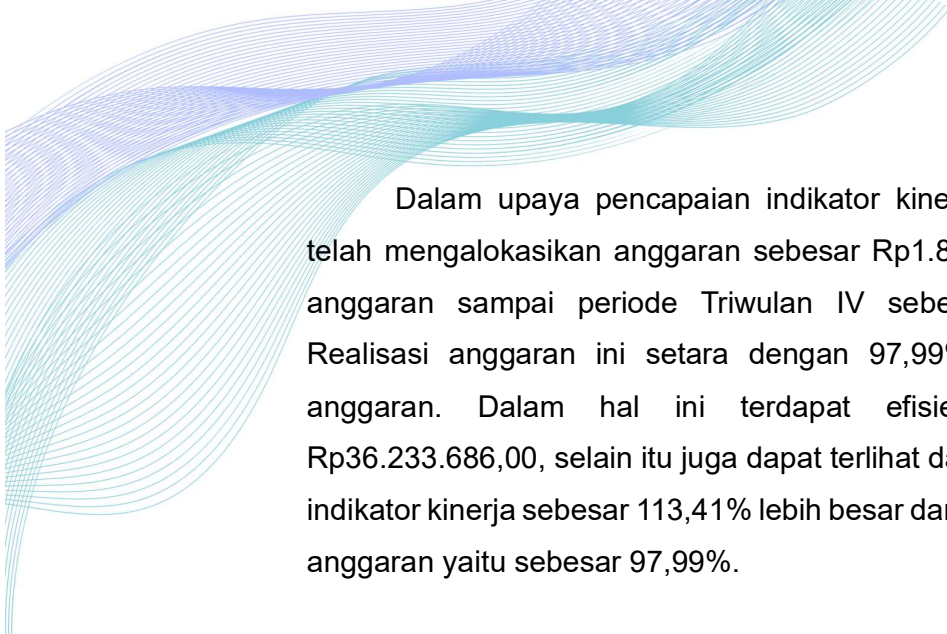
Pada tahun 2023, target kerja sama regional dan multilateral yang akan diimplementasikan adalah kerja sama dengan 4 organisasi yaitu ASEAN, FAO, UNIDO, dan WTO. Pada triwulan IV tahun 2023, telah tercapai implementasi kerja sama dengan ASEAN, FAO, WTO dan UNIDO dan terdapat tambahan capaian kegiatan IORA dan IPEF.

Berikut merupakan kegiatan implementasi kerja sama regional dan multilateral yang dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2023:

- 1) Menghadiri 26th *Fisheries Consultative Group of the ASEAN - SEAFDEC Strategic Partnership (FCG-ASSP)* pada 23 – 24 November 2023;
- 2) Menghadiri *The Regional Training Course on energy Optimatization for Fishing Vessel and Optimal Post-Harvest Fish Handling Technique di Samut Prakan, Thailand* pada 27 November – 1 Desember 2023;
- 3) Menghadiri ASEAN – China Seaweed Forum pada 10 – 13 November 2023;
- 4) Menghadiri WTO *Fish Week* ke- 8 di Jenewa, Swiss tanggal 4 – 8 Desember 2023;
- 5) Melaksanakan Fase *Inception* Kegiatan Hibah *Global Quality and Standard Programme Phase 2* pada Oktober – Desember 2023;
- 6) Mengikuti Rapat *National Consultation Meeting* Persiapan Pertemuan FAO *Asia Pacific Regional Conference* ke-37;



Gambar 6 The 26th Fisheries Consultative Group of the ASEAN - SEAFDEC Strategic Partnership (FCG-ASSP)



Dalam upaya pencapaian indikator kinerja ini Setditjen PDSPKP telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp1.803.327.000,00. Realisasi anggaran sampai periode Triwulan IV sebesar Rp1.767.093.314,00. Realisasi anggaran ini setara dengan 97,99% terhadap total alokasi anggaran. Dalam hal ini terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp36.233.686,00, selain itu juga dapat terlihat dari persentase pencapaian indikator kinerja sebesar 113,41% lebih besar daripada persentase realisasi anggaran yaitu sebesar 97,99%.

4. Rasio Jumlah Pemberitaan Negatif Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan terhadap Total Pemberitaan Sektor Kelautan dan Perikanan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kehumasan di Lingkungan KKP, kegiatan kehumasan yang dilaksanakan, dirancang, dan disusun untuk mewujudkan keterbukaan, itikad baik, kerja sama, hubungan yang baik dan bermanfaat antara KKP dengan pihak lain serta membantu KKP untuk sigap dan responsif terhadap informasi yang beredar yang pada akhirnya akan mewujudkan citra positif KKP.

Pemberitaan tentang Ditjen PDSPKP adalah penyampaian informasi/cerita/keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang berkaitan dengan Ditjen PDSPKP yang dapat mengandung *tone*/sentimen positif, negatif maupun netral. Jumlah pemberitaan yang negatif merupakan jumlah pemberitaan tentang sektor kelautan dan perikanan yang dimuat di media massa baik lokal maupun nasional dalam format *online*, cetak dan audio visual, yang memiliki *tone* negatif.

Tabel 6. Ikhtisar Pencapaian Rasio Jumlah Pemberitaan Negatif Bidang PDSPKP terhadap Total Pemberitaan Sektor KP

Indikator Kinerja	Target			Realisasi TW IV 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi TW IV 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi TW IV 2022-TW I 2023 (%)
	Tahun 2023	TW IV 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW IV 2023	Tahun 2024		
Rasio jumlah pemberitaan negatif bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan terhadap total pemberitaan sektor kelautan dan perikanan (%)	≤5	≤5	-	0	120	120	-	100	-

Selama Triwulan IV tahun 2023, tidak ada berita bertone negatif tentang Ditjen PDSPKP sehingga angka capaiannya 0%. Capaian ini setara dengan 120% terhadap target tahun 2023 sebesar ≤5% (terhitung otomatis pada Aplikasi Kinerjaku) atau setara dengan 120% terhadap target triwulan IV tahun 2023 sebesar ≤5% (terhitung otomatis pada Aplikasi Kinerjaku).

Rasio Jumlah Pemberitaan Negatif Bidang PDSPKP terhadap Total Pemberitaan Sektor KP belum tercantum dalam dokumen Renstra Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024 dan dokumen dimaksud belum bisa direvisi karena penyusunan organisasi KKP masih dalam proses pembahasan, sehingga capaian tidak bisa dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024. Jika dibandingkan dengan capaian TW IV Tahun 2022, maka capaian TW IV Tahun 2023 tidak mengalami penurunan ataupun peningkatan.

Ditjen PDSPKP telah melakukan beberapa kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian target indikator kinerja ini antara lain :

- a. Membuat siaran pers setiap *event* Ditjen PDSPKP sehingga media massa tidak ada kesalahpahaman dalam menyusun berita;
- b. Menjalin media *relationship* yang baik dengan media massa melalui pelayanan informasi dan publikasi yang informatif untuk kegiatan prioritas Ditjen PDSPKP;
- c. Menayangkan berbagai konten informasi dan edukasi tentang Ditjen PDSPKP melalui akun resmi media sosial dan *website* Ditjen PDSPKP.

Tabel 7. Rekapitulasi Jumlah Pemberitaan Ditjen PDSPKP Berdasarkan Tone Pemberitaan

No	Bulan	Tone Pemberitaan			Jumlah
		Positif	Negatif	Netral	
1	Oktober	36	0	2	38
2	November	34	0	4	38
3	Desember	37	0	2	39
Jumlah		107	0	8	115

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja ini Setditjen PDSPKP telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp1.696.303.000,00. Realisasi anggaran sampai periode Triwulan IV sebesar Rp1.691.303.964,00. Realisasi anggaran ini setara dengan 99,71% terhadap total alokasi anggaran. Dalam hal ini terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp4.999.036,00, selain itu juga dapat terlihat dari persentase pencapaian indikator kinerja sebesar 120% lebih besar daripada persentase realisasi anggaran yaitu sebesar 99,71%.

5. Persentase Pemenuhan Dokumen Maturitas SPIP Ditjen PDSPKP

Tingkat maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern. Penilaian maturitas SPIP dilakukan melalui penilaian pelaksanaan SPIP/manajemen risiko; pengelolaan keuangan, pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Tujuan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah untuk menjelaskan secara rinci mengenai kondisi SPIP serta mewujudkan budaya pengendalian intern (*internal control culture*) dalam rangka menciptakan pengendalian intern yang handal agar tercapai

keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efisien dan efektif, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian.

Tabel 8. Ikhtisar Pencapaian Persentase Pemenuhan Dokumen Maturitas SPIP Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target			Realisasi TW IV 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi TW IV 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi TW IV 2022-TW I 2023 (%)
	Tahun 2023	TW IV 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW IV 2023	Tahun 2024		
Persentase pemenuhan dokumen Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (%)	100	100	-	100	100	100	-	100	-

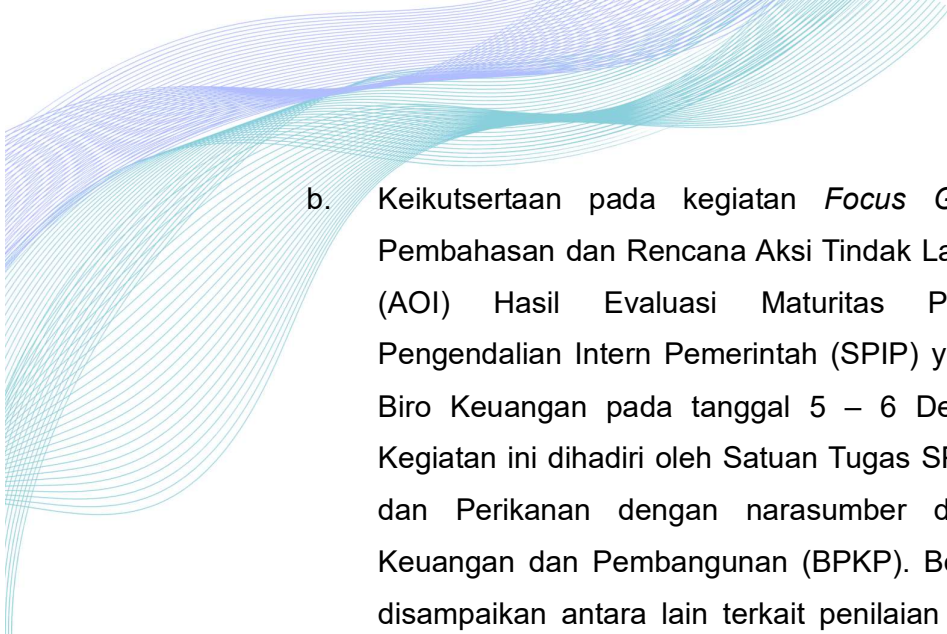
Capaian indikator kinerja persentase pemenuhan dokumen maturitas SPIP Ditjen PDSPKP tahun 2023 sebesar 100% atau setara dengan 100% dari target yang ditetapkan 100%. Jika dibandingkan dengan capaian TW IV Tahun 2022, maka capaian TW IV Tahun 2023 tidak mengalami penurunan ataupun peningkatan. Indikator kinerja ini merupakan indikator baru dan belum tercantum pada rencana strategis tahun 2020-2024 sehingga capaiannya tidak bisa dibandingkan dengan target jangka menengah.

Setditjen PDSPKP telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini antara lain:

- a. Keikutsertaan pada penginputan kertas kerja Maturitas SPIP tahun 2022/2023 di Jakarta pada tanggal 6 dan 11 – 12 Oktober 2023;



Gambar 7 Keikutsertaan Penginputan kertas kerja maturitas SPIP

- 
- b. Keikutsertaan pada kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) Pembahasan dan Rencana Aksi Tindak Lanjut *Area of Improvement* (AOI) Hasil Evaluasi Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang diselenggarakan oleh Biro Keuangan pada tanggal 5 – 6 Desember 2023 di Bekasi. Kegiatan ini dihadiri oleh Satuan Tugas SPIP Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan narasumber dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Beberapa hal penting yang disampaikan antara lain terkait penilaian risiko kecurangan (*Fraud Risk Assessment/FRA*) dan rencana aksi tindak lanjut AOI yang efektif.

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Setditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sebesar Rp1.020.605.646,00 sampai dengan Bulan Desember 2023. Realisasi ini setara dengan 99,92% terhadap pagu anggaran sebesar Rp1.021.389.000,00. Dalam hal ini terdapat efisiensi penggunaan anggaran yang dapat terlihat dari persentase pencapaian indikator kinerja sebesar 123,55% lebih besar daripada persentase realisasi anggaran yaitu sebesar 99,92%.

6. Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Setditjen PDSPKP

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018).

Tabel 9. Ikhtisar Pencapaian Indeks Profesionalitas ASN lingkungan Setditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target			Realisasi TW IV 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi TW IV 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi TW IV 2022-TW I 2023 (%)
	Tahun 2023	TW IV 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW IV 2023	Tahun 2024		
Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Indeks)	83,2	83,2	76	91,23	109,65	109,65	120,04	83,67	9,04

Pada tahun 2023 capaian indeks profesionalitas ASN Setditjen PDSPKP sebesar 91,23, capaian dimaksud setara dengan 109,65% terhadap target tahun 2023 sebesar 83,2. Jika dibandingkan dengan target tahun 2024 sebesar 76, maka capaian sampai dengan triwulan IV tahun 2023 telah mencapai 120,04%, dan jika dibandingkan dengan Nilai indeks profesionalitas ASN Ditjen PDSPKP tahun 2022 sebesar 83,67, maka capaian sampai dengan triwulan IV tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 9,04%.

Ditjen PDSPKP telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian indeks profesionalitas ASN lingkup Ditjen PDSPKP antara lain:

- a. Keikutsertaan pada kegiatan Identifikasi Kebutuhan Kompetensi Pengembangan Sumber Daya Manusia Lingkup Ditjen PDSPKP yang dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 2023;
- b. Melaksanakan rapat koordinasi Penataan Pegawai Lingkup Ditjen PDSPKP pada tanggal 4 Desember 2023;
- c. Rapat Monitoring dan Evaluasi Kinerja dan Disiplin Pegawai Triwulan III dan IV Tahun 2023 lingkup Ditjen PDSPKP pada tanggal 8 Desember 2023;
- d. Kegiatan Pembahasan Rencana Penataan Tim Kerja Lingkup Ditjen PDSPKP pada tanggal 15 Desember 2023;

- e. Evaluasi dan Validasi Penyesuaian Tim Kerja lingkup Ditjen PDSPKP oleh Biro SDMAO pada tanggal 20 Desember 2023;
- f. Rapat Persiapan Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis di Lingkungan Ditjen PDSPKP pada tanggal 20 Desember 2023.



Gambar 8 Monitoring dan Evaluasi Kinerja dan Disiplin Pegawai Triwulan III dan IV Tahun 2023 lingkup Ditjen PDSPKP

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Ditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sebesar Rp2.039.214.463,00 sampai dengan Bulan Desember 2023. Realisasi ini setara dengan 99,9% terhadap pagu anggaran sebesar Rp2.039.214.463,00. Dalam hal ini terdapat efisiensi penggunaan anggaran yang dapat terlihat dari persentase pencapaian indikator kinerja sebesar 109,65% lebih besar daripada persentase realisasi anggaran yaitu sebesar 99,99%.

7. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di lingkungan Setditjen PDSPKP

SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Nilai PMSAKIP merupakan penilaian mandiri oleh Itjen KKP terhadap penerapan SAKIP pada instansi pemerintah yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada penerapan *outcome* dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Tabel 10. Ikhtisar Pencapaian Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Setditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target			Realisasi TW IV 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi TW IV 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi TW IV 2022-TW I 2023 (%)
	Tahun 2023	TW IV 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW IV 2023	Tahun 2024		
Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Nilai)	80,5	80,5	84,5	83,8	104,10	104,10	99,17	81,19	3,21

Berdasarkan hasil penilaian Tim Itjen KKP pada tahun 2023 capaian nilai PMSAKIP Setditjen PDSPKP sebesar 83,8, capaian dimaksud setara dengan 104,10% terhadap target tahun 2023 sebesar 80,5. Jika dibandingkan dengan target tahun 2024 sebesar 84,5, capaian sampai dengan triwulan IV tahun 2023 telah mencapai 99,17%. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 81,19, maka capaian sampai dengan triwulan IV tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 3,21%.

Setditjen PDSPKP telah melakukan beberapa kegiatan guna mendukung pencapaian target indikator kinerja ini antara lain:

- a. Keikutsertaan pada kegiatan *workshop* pelaporan kinerja pada tanggal 18 – 20 Oktober 2023 yang dihadiri oleh tim kinerja Ditjen PDSPKP dengan narasumber dari Kemenpan RB, Direktorat Tata Bahasa kemendikbud dan Tenaga ahli pelaporan kinerja pada SAPK KKP;



Gambar 9 Workshop Pelaporan Kinerja Ditjen PDSPKP

- b. Keikutsertaan pada *Focus Group Discussion* (FGD) Rancangan Awal Teknokratik Ditjen PDSPKP Tahun 2025-2029 pada tanggal 25 – 26 Oktober 2023 di Bogor Jawa Barat;



Gambar 10 Focus Group Discussion (FGD) Rancangan Awal Teknokratik Ditjen PDSPKP

- c. Berpartisipasi pada kegiatan *Benchmarking* SAKIP dan RB Tematik pada tanggal 1 – 3 November 2023 di Yogyakarta;



Gambar 11 Benchmarking SAKIP dan RB Tematik KKP

- d. Melakukan validasi IKU (prognosa pencapaian kinerja tahun 2023) dan rencana penetapan indikator kinerja dan target tahun 2024 pada tanggal 21 – 23 November 2023 di Jakarta;
- e. Keikutsertaan melakukan reviu perjanjian kinerja, manual indikator kinerja, rincian target indikator kinerja, rencana aksi atas perjanjian kinerja, pohon kinerja, dan matriks *cascading* lingkup Ditjen PDSPKP Tahun 2023 atas perubahan anggaran *Automatic adjusmet* pada tanggal 6 Desember 2023;
- f. Keikutsertaan kegiatan pengukuran kinerja, verifikasi data capaian kinerja, penyusunan laporan kinerja, dan penyusunan evaluasi rencana aksi dilakukan secara berkala triwulanan. Kegiatan-kegiatan dimaksud telah dilakukan dengan melibatkan pejabat eselon II (Sesditjen PDSPKP) sebagai data dukung keterlibatan pimpinan dalam penilaian

aspek pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) PMSAKIP;



Gambar 12 Verifikasi data Capaian kinerja Ditjen PDSPKP Periode Triwulan III Tahun 2023

- g. Penyampaian laporan kinerja yang sudah disahkan kepada Direktur Jenderal PDSPKP serta *stakeholders* terkait secara tepat waktu yakni paling lambat 3 minggu setelah periode pelaporan triwulanan berakhir yang dibuktikan dengan surat resmi. Penyampaian laporan kinerja secara tepat waktu akan meningkatkan penilaian pada aspek pelaporan pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) PMSAKIP.

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Setditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sebesar Rp7.499.547.000,00 sampai dengan Bulan Desember 2023. Realisasi ini setara dengan 99,9% terhadap pagu anggaran sebesar Rp7.499.080.219,00. Dalam hal ini terdapat efisiensi penggunaan anggaran yang dapat terlihat dari persentase pencapaian indikator kinerja sebesar 109,65% lebih besar daripada persentase realisasi anggaran yaitu sebesar 99,9%.

8. Persentase Penyelesaian Temuan BPK Di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (%)

Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) lingkungan Sekretariat Ditjen PDSPKP merupakan jumlah nilai temuan keuangan terbatas pada nilai tuntutan ganti rugi Unit Eselon II atas hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan

Keuangan Sekretariat Ditjen PDSPKP Tahun 2022 dibandingkan dengan realisasi anggaran Sekretariat Ditjen PDSPKP Tahun 2022.

Tabel 11. Ikhtisar Pencapaian Persentase Penyelesaian Temuan BPK Di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (%)

Indikator Kinerja	Target			Realisasi TW IV 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi TW IV 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi TW IV 2022-TW I 2023 (%)
	Tahun 2023	TW IV 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW IV 2023	Tahun 2024		
Persentase Penyelesaian Temuan BPK Di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (%)	100	100		100	100	100	-		

Pada tahun 2023, pencapaian Persentase Penyelesaian Temuan BPK Di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan ditargetkan sebesar 100%, capaian dimaksud setara dengan 100% terhadap target tahun 2023 sebesar 100. Indikator kinerja ini merupakan indikator baru dan belum tercantum pada rencana strategis tahun 2020 – 2024 sehingga capaiannya tidak bisa dibandingkan dengan target jangka menengah.

Sekretariat Ditjen PDSPKP telah melakukan beberapa kegiatan guna mendukung pencapaian target indikator kinerja ini antara lain:

- a. Keikutsertaan pada kegiatan Rekonsiliasi, Monev dan Perbaikan data SAKTI Periode Triwulan III yaitu tanggal 9 – 10 Oktober melalui daring dan diikuti oleh seluruh satker lingkup Ditjen PDSPKP;
- b. Melaksanakan koordinasi tindak lanjut atas usulan perbaikan dari Tim Reviu Inspektorat IV atas permasalahan Ketidaksesuaian Akun dengan Kode Persediaan dan melakukan reklasifikasi Aset yang memenuhi kriteria Properti Investasi.

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Setditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sebesar Rp603.989.900,00 sampai dengan Bulan Desember 2023. Realisasi ini setara dengan 99,77% terhadap pagu anggaran

sebesar Rp605.397.000,00. Dalam hal ini terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp1.407.100,00. Efisiensi anggaran juga dapat terlihat dari persentase pencapaian indikator kinerja sebesar 100% lebih besar daripada persentase realisasi anggaran yaitu sebesar 99,77%.

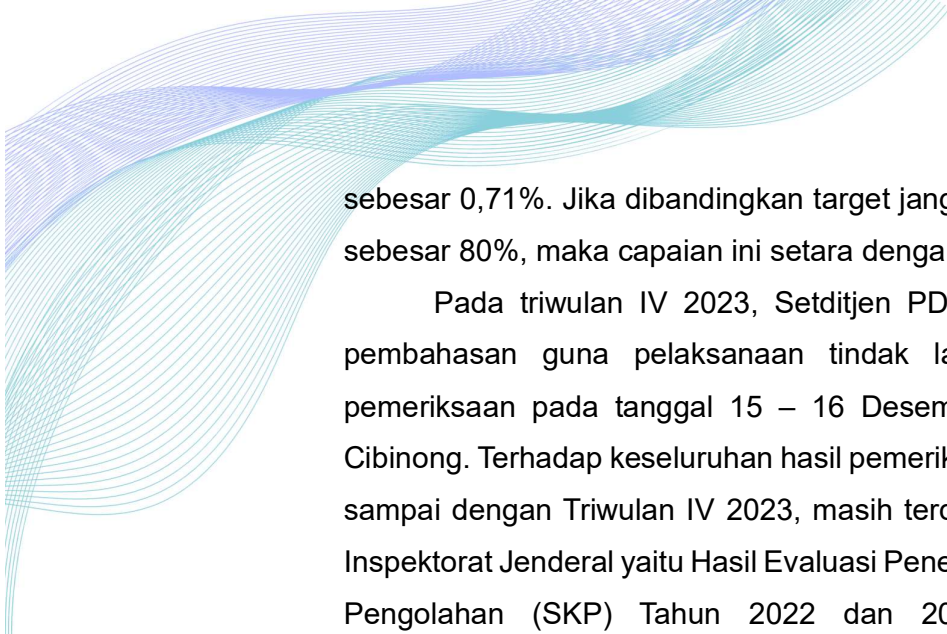
9. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di lingkungan Setditjen PDSPKP

Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di lingkungan Setditjen PDSPKP didefinisikan sebagai jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik berdasarkan surat maupun bab) yang terbit pada Triwulan IV Tahun 2022 s.d Triwulan IV Tahun 2023 yang telah ditindaklanjuti oleh seluruh mitra kerja yang menjadi objek pengawasan. Pengukuran indikator kinerja ini dilakukan oleh Itjen KKP atau dapat dilihat pada Aplikasi SIDAK dengan periode perhitungan triwulanan.

Tabel 12. Ikhtisar Pencapaian Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di lingkungan Setditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target			Realisasi TW IV 2023	Persentase Realisasi Terhadap Target (%)			Realisasi TW IV 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi TW IV 2022-TW IV 2023 (%)
	Tahun 2023	TW IV 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW IV 2023	Tahun 2024		
Persentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (%)	75	75	75	97,62	130,16	130,16	130,16	96,93	0,71

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Setditjen PDSPKP pada Triwulan IV tahun 2023 adalah sebesar 97,62%. Capaian ini setara dengan 130,16% terhadap target Triwulan IV dan Target tahun 2023 yaitu 75%. Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar 96,93%, maka capaian Triwulan IV tahun 2023 meningkat



sebesar 0,71%. Jika dibandingkan target jangka menengah tahun 2024 sebesar 80%, maka capaian ini setara dengan 130,16%.

Pada triwulan IV 2023, Setditjen PDSPKP telah mengadakan pembahasan guna pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan pada tanggal 15 – 16 Desember di Raiser Ikan Hias, Cibinong. Terhadap keseluruhan hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal sampai dengan Triwulan IV 2023, masih terdapat 1 hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal yaitu Hasil Evaluasi Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) Tahun 2022 dan 2023 yang masih belum ditindaklanjuti sampai dengan hari terakhir pembahasan.

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Setditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sebesar Rp248.605.014,00 sampai dengan Bulan Desember 2023. Realisasi ini setara dengan 99,85% terhadap pagu anggaran sebesar Rp248.976.000,00. Dalam hal ini terdapat efisiensi penggunaan anggaran yang dapat terlihat dari persentase pencapaian indikator kinerja sebesar 130,16% lebih besar daripada persentase realisasi anggaran yaitu sebesar 99,85%.

10. Persentase Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Ditjen PDSPKP yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Penghitungan persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang standar, diperoleh dari persentase unit kerja level 1 dan 2 yang tergabung dan mendistribusikan informasinya dalam sistem informasi manajemen pengetahuan terpilih dibandingkan dengan seluruh unit kerja di Ditjen PDSPKP.

Tabel 13. Ikhtisar Pencapaian Persentase Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Ditjen PDSPKP yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar

Indikator Kinerja	Target			Realisasi TW IV 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi TW IV 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi TW IV 2022-TW I 2023 (%)
	Tahun 2023	TW IV 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW IV 2023	Tahun 2024		
Persentase Unit kerja di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan yang menerapkan manajemen pengetahuan terstandar (%)	92	92	88	133,33	144,92	144,92	151,51	100	33,33

Persentase Unit kerja lingkup Sekretariat Ditjen PDSPKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Triwulan IV tahun 2023 adalah sebesar 133,33%. Capaian ini setara dengan 144,92% terhadap target triwulan IV tahun 2023 dan target tahun 2023 yakni 92%. Jika dibandingkan target jangka menengah tahun 2024 yakni 88, maka capaian Triwulan IV tahun 2023 setara dengan 151,51%. Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yaitu pada triwulan IV tahun 2022, capaian triwulan IV 2023 mengalami peningkatan sebesar 33,33%.

Pengukuran capaian Manajemen Pengetahuan pada Triwulan IV Tahun 2023 menggunakan *platform Portal Collaboration Office* (<https://portal.kkp.go.id>). Sekretariat Ditjen PDSPKP telah melaksanakan beberapa upaya dalam rangka mencapai target indikator kinerja ini antara lain Optimalisasi penggunaan aplikasi manajemen pengetahuan *platform Portal Collaboration Office* (<https://portal.kkp.go.id>).

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja ini Setditjen PDSPKP telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 1.696.303.000,00. Realisasi anggaran sampai periode Triwulan IV sebesar Rp. 1.691.303.964,00. Realisasi anggaran ini setara dengan 99,71% terhadap total alokasi anggaran. Dalam hal ini terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp4.999.036,00. Efisiensi anggaran juga dapat terlihat dari persentase pencapaian indikator kinerja sebesar 144,92% lebih besar daripada persentase realisasi anggaran yaitu sebesar 99,71%.

11. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Setditjen PDSPKP

Nilai Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Indikator kinerja ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L.

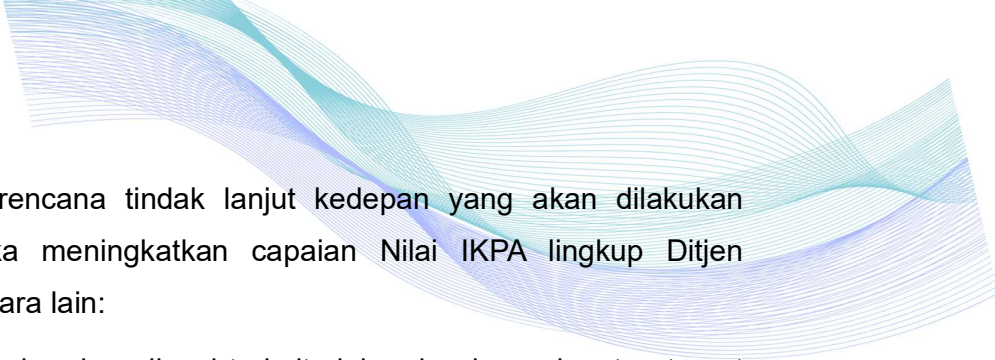
Tabel 14. Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Setditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target			Realisasi TW IV 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi TW IV 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi TW IV 2022-TW I 2023 (%)
	Tahun 2023	TW IV 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW IV 2023	Tahun 2024		
Nilai Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Nilai)	93,75	93,75	93,76	89,37	95,33	95,33	95,32	92,83	-3,73

Nilai IKPA Setditjen PDSPKP tahun 2023 tercapai sebesar 89,37. Capaian ini setara dengan 95,53% terhadap target tahun 2023 sebesar 93,75 atau 95,32,% terhadap target jangka menengah tahun 2024 sebesar 93,76. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 92,83, maka capaian tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 3,73%.

Beberapa faktor yang menyebabkan IKPA Setditjen PDSPKP tidak tercapainya target antara lain :

- a. Adanya deviasi halaman III DIPA yang disebabkan kurang sesuainya realisasi pelaksanaan anggaran dengan rencana penarikan dananya;
- b. Anggaran belum maksimal terealisasikan.



Adapun rencana tindak lanjut kedepan yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan capaian Nilai IKPA lingkup Ditjen PDSPKP, antara lain:

- a. Melaksanakan koordinasi terkait sinkronisasi penginputan target dan data capaian output secara berkala;
- b. Koordinasi dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan dan anggaran baik fisik maupun nonfisik;
- c. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas rencana penarikan dana pada lembar III DIPA dengan realisasi pelaksanaan anggaran dan menyusun prognosa realisasi anggaran sampai dengan Desember 2024.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan pad periode triwulan IV guna pencapaian indikator kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Ditjen PDSPKP antara lain:

- a. Pembahasan percepatan revisi halaman 3 DIPA yang dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2023. Pada pertemuan ini dibahas mengenai Monev dan asistensi penginputan Capaian Output periode bulan September dan revisi halaman 3 DIPA;
- b. Melakukan penginputan capaian output periode Oktober 2023 yang dilaksanakan tanggal 6 November 2023;
- c. Melakukan pembahasan penginputan capaian output periode November 2023 pada tanggal 5 Desember 2023 dilakukan pembahasan terkait.

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Ditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sebesar Rp314.551.976,00 sampai dengan Bulan Desember 2023. Realisasi ini setara dengan 99,8% terhadap pagu anggaran sebesar Rp315.090.000,00.

12. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) di Lingkungan Setditjen PDSPKP

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yg dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Nilai ini

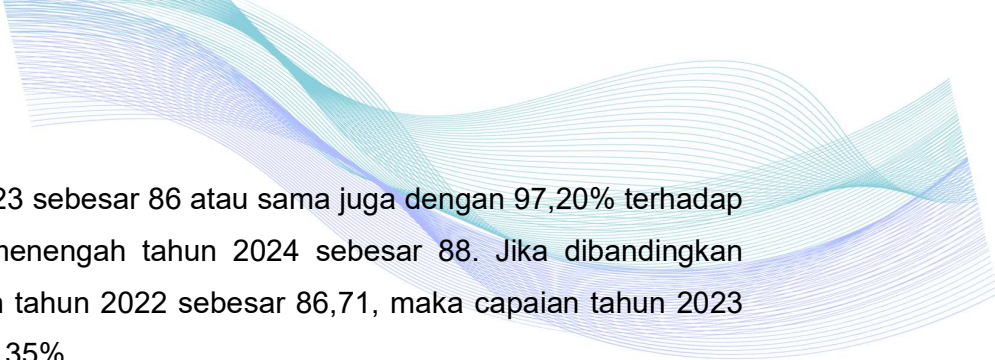
diperoleh dari data *input* dan *output* yang dimasukkan setiap Satuan Kerja lingkup KKP kedalam aplikasi SMART Kemenkeu.

Aplikasi SMART DJA Kemenkeu telah dibangun dan efektif digunakan sejak tahun anggaran 2012 untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Aplikasi SMART DJA Kemenkeu yang mengacu pada PMK tersebut adalah melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja atas Aspek Implementasi. Namun, seiring dengan penyempurnaan sistem pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, aplikasi SMART DJA Kemenkeu juga telah disempurnakan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja anggaran yang mengacu pada PMK tersebut dengan melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja yang mencakup Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek Konteks. Penyempurnaan pelaksanaan pengukuran evaluasi kinerja anggaran kembali dilakukan untuk menyesuaikan pelaksanaan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) dengan diterbitkannya PMK Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Tabel 15. Ikhtisar Pencapaian Nilai Kinerja Anggaran (NKA) di Lingkungan Sekretariat Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target			Realisasi TW IV 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi TW IV 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi TW IV 2022-TW I 2023 (%)
	Tahun 2023	TW IV 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW IV 2023	Tahun 2024		
Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Nilai)	86	86	88	85,54	99,47	99,47	97,20	86,71	-1,35

Nilai Kinerja Anggaran lingkup Setditjen PDSPKP tahun 2023 tercapai sebesar 85,54. Capaian ini setara dengan 99,47% terhadap



target tahun 2023 sebesar 86 atau sama juga dengan 97,20% terhadap target jangka menengah tahun 2024 sebesar 88. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 86,71, maka capaian tahun 2023 turun sebesar 1,35%.

Penyebab tidak tercapainya target Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Ditjen PDSPKP periode triwulan IV tahun 2023 antara lain:

- a. Adanya deviasi halaman III DIPA yang disebabkan kurang sesuainya realisasi pelaksanaan anggaran dengan rencana penarikan dananya;
- b. Anggaran belum maksimal terealisasikan.

Adapun rencana tindak lanjut kedepan yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan capaian Nilai IKPA lingkup Ditjen PDSPKP, antara lain:

- a. Melaksanakan koordinasi terkait sinkronisasi penginputan target dan data capaian output secara berkala;
- b. Koordinasi dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan dan anggaran baik fisik maupun nonfisik;
- c. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas rencana penarikan dana pada lembar III DIPA dengan realisasi pelaksanaan anggaran dan menyusun prognosa realisasi anggaran sampai dengan Desember 2024.

Setditjen PDSPKP telah melakukan beberapa kegiatan guna mendukung pencapaian target indikator kinerja ini antara lain:

- a) Melakukan penginputan capaian output melalui aplikasi SMART Kemenkeu oleh petugas yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Dirjen PDSPKP Nomor 55 Tahun 2023 tentang Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja Satker Dekonsentrasi Lingkup Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan;
- b) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas capaian output yang telah diinput seluruh satker Ditjen PDSPKP pada Aplikasi SMART Kemenkeu;

- c) Berpartisipasi dalam rapat pembahasan NKA KKP pada tanggal 28 Desember 2023 di Jakarta.



Gambar 13 Kegiatan Pembahasan NKA KKP

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran, Setditjen PDSPKP telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp540.552.000,00 dengan total realisasi Rp540.513.526,00 atau setara dengan 99,9%.

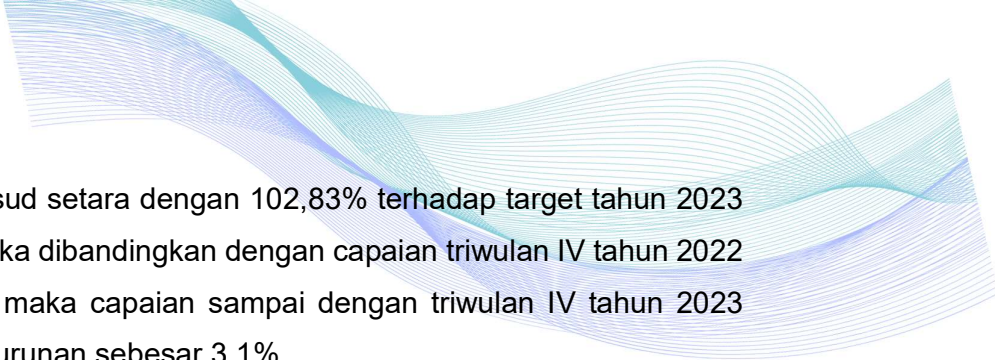
13. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Setditjen PDSPKP

Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa di Lingkungan Setditjen PDSPKP merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Ditjen PDSPKP, terhadap ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 16. Ikhtisar Pencapaian Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target			Realisasi TW IV 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi TW IV 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi TW IV 2022-TW I 2023 (%)
	Tahun 2023	TW IV 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW IV 2023	Tahun 2024		
Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (%)	77,5	77,5	-	79,69	102,83	102,83	-	82,24	-3,10

Pada tahun 2023 Capaian tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa di lingkungan Setditjen PDSPKP mengacu berdasarkan penilaian IKU ini pada level I Ditjen PDSPKP yaitu sebesar 79,69,



Capaian dimaksud setara dengan 102,83% terhadap target tahun 2023 sebesar 77,5. Jika dibandingkan dengan capaian triwulan IV tahun 2022 sebesar 82,24, maka capaian sampai dengan triwulan IV tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 3,1%.

Setditjen PDSPKP telah melakukan beberapa kegiatan guna mendukung pencapaian target indikator kinerja ini antara lain :

- a. Keikutsertaan pada Kegiatan Pengisian dan Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP Tahun 2024 LKPP pada tanggal 31 Oktober – 2 November 2023 di Hotel Alila, Solo, Jawa Tengah. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah melakukan Penginputan Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP sesuai dengan RKA-KL Ditjen PDSPKP Tahun Anggaran 2024;
- b. Keikutsertaan pada Kegiatan Gelar Progress PBJ Direktorat Jenderal PDSPKP pada tanggal 9 Oktober 2023 yang dilaksanakan di Ruang *Lounge*, Gedung Mina Bahari III Lantai 15. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PBJ di Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP Tahun Anggaran 2023;
- c. Keikutsertaan pada Kegiatan Penyusunan Laporan Bulanan PBJ dan *Update* Progress PBJ Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP Periode Bulan November 2023 pada tanggal 11 – 12 Desember 2023 di Raiser Ikan Hias Cibinong. Tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk melakukan penyusunan laporan bulanan PBJ dan Update Progress PBJ Lingkup Ditjen PDSPKP.

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Setditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sebesar Rp51.567.880,00 sampai dengan Bulan Desember 2023. Realisasi ini setara dengan 99,44% terhadap pagu anggaran sebesar Rp51.600.000,00. Efisiensi anggaran dapat terlihat dari persentase pencapaian indikator kinerja sebesar 102,83% lebih besar daripada persentase realisasi anggaran yaitu sebesar 99,44%.

14. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN di Lingkungan Setditjen

PDSPKP

Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN di lingkungan Setditjen PDSPKP merupakan suatu ukuran yang menggambarkan efektivitas kualitas kinerja pengawasan intern Setditjen PDSPKP dalam mengawal dan memastikan pengelolaan BMN di lingkungan Setditjen PDSPKP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

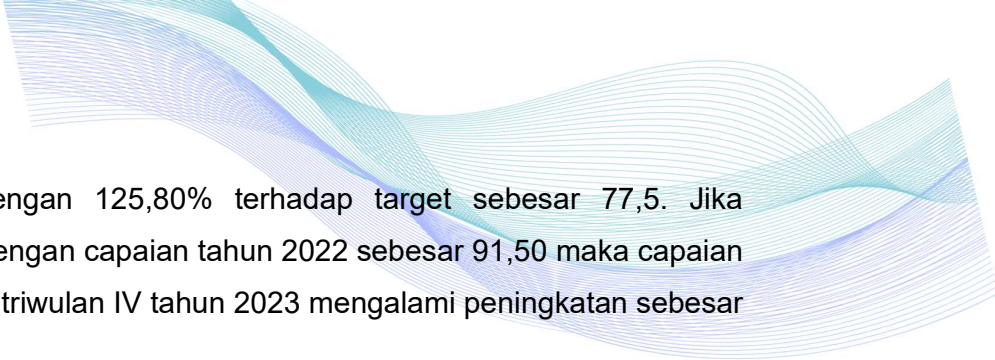
Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN di lingkungan Setditjen PDSPKP diukur melalui pemenuhan beberapa indikator berikut :

- Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2023;
- Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST sampai dengan Triwulan IV tahun 2023 baik ke pengguna barang dan pengelola barang;
- Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023;
- Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2022 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian;
- Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu.

Tabel 17. Ikhtisar Pencapaian Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Setditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target			Realisasi TW IV 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi TW IV 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi TW IV 2022-TW I 2023 (%)
	Tahun 2023	TW IV 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW IV 2023	Tahun 2024		
Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (%)	77,5	77,5		97,5	125,80	125,80		91,50	6,56

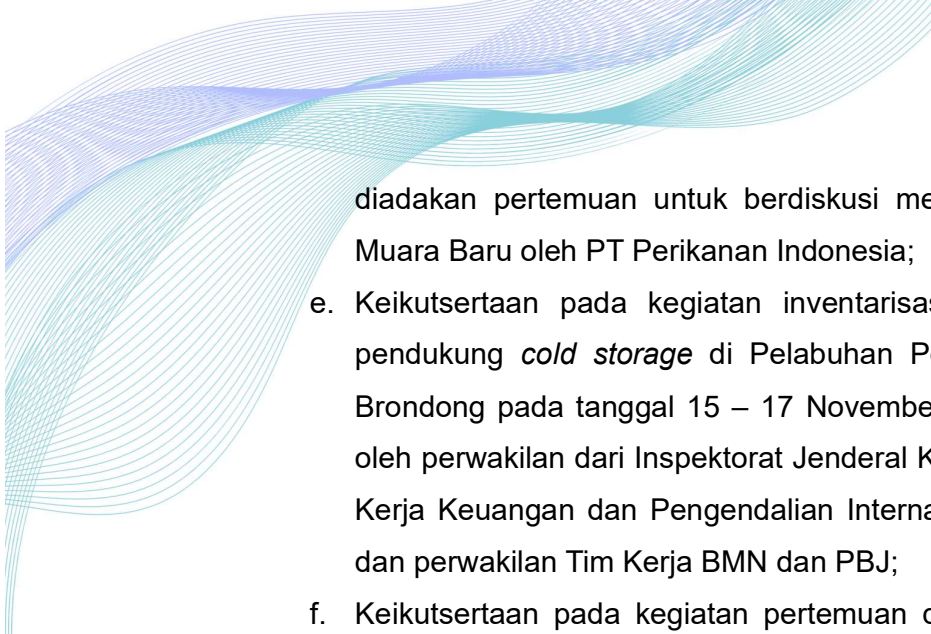
Pada tahun 2023, Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN di Lingkungan Setditjen PDSPKP ditargetkan sebesar 77,5%. Nilai Capaian indikator ini mengacu pada nilai level 1 Ditjen PDSPKP yaitu



97,5 setara dengan 125,80% terhadap target sebesar 77,5. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 91,50 maka capaian sampai dengan triwulan IV tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 6,55%.

Setditjen PDSPKP telah melakukan beberapa kegiatan guna mendukung pencapaian target indikator kinerja ini antara lain :

- a. Keikutsertaan pada kegiatan Rekonsiliasi Pencatatan Aset Tetap dan Persediaan di Raiser Ikan Hias, Cibinong pada tanggal 2 – 3 Oktober 2023. Tujuan rapat adalah untuk melengkapi aset tetap dan persediaan yang belum didetailkan, aset tetap belum validasi, dan ketidaksesuaian akun;
- b. Keikutsertaan pada kegiatan Sosialisasi Tata Cara Pembentukan BLU oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan – Kementerian Keuangan RI pada tanggal 5 Oktober 2023 di Ruang Rapat Branding, Gedung Mina Bahari III. Agenda rapat adalah dalam rangka persiapan pembentukan Badan Layanan Usaha (BLU);
- c. Keikutsertaan pada kegiatan pertemuan dalam rangka koordinasi terkait dengan *Aanwijzing* Lelang Kapal MV Silver Sea II pada tanggal 6 Oktober 2023 di Ruang Rapat Branding. Agenda rapat adalah dalam rangka menindaklanjuti pertemuan dengan KPKNL Aceh, serta dalam rangka persiapan lelang Kapal MV Silver Sea II;
- b. Keikutsertaan pada kegiatan *benchmarking* BLUBPPP Tegal yang dilaksanakan pada tanggal 23 – 24 Oktober 2023 di BLUBPPP Tegal. Tujuan dari kegiatan adalah *benchmarking* mengenai usulan penetapan BPPP Tegal untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU;
- c. Keikutsertaan pada kegiatan pertemuan dalam rangka serah terima Kapal MV Silver Sea II kepada pemenang lelang yang dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2023 di Dermaga CT-3 Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS). Lelang telah dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2023;
- d. Keikutsertaan pada kegiatan *Forum Group Discussion (FGD)* Kerja Sama Pemanfaatan BMN dengan narasumber dari Kementerian Keuangan RI c.q. DJKN pada tanggal 13 November 2023. Tujuan



diadakan pertemuan untuk berdiskusi mengenai rencana KSP PIM Muara Baru oleh PT Perikanan Indonesia;

- e. Keikutsertaan pada kegiatan inventarisasi BMN berupa peralatan pendukung *cold storage* di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong pada tanggal 15 – 17 November 2023. Pertemuan dihadiri oleh perwakilan dari Inspektorat Jenderal KKP, Direktorat Logistik, Tim Kerja Keuangan dan Pengendalian Internal, Kepala PPN Brondong, dan perwakilan Tim Kerja BMN dan PBJ;
- f. Keikutsertaan pada kegiatan pertemuan dalam rangka pembahasan dokumen usulan pembentukan BLU Ditjen PDSPKP pada tanggal 26 – 28 November 2023 di Bogor. Tujuan pertemuan adalah pembahasan dokumen usulan pembentukan BLU (substansif, teknis, dan administrasi);
- g. Keikutsertaan pada kegiatan pertemuan dalam rangka pembahasan persiapan pembentukan BLU Ditjen PDSPKP pada tanggal 1 Desember 2023 di Dit PPK BLU – Kementerian Keuangan RI. Tujuan dari pertemuan adalah untuk berdiskusi mengenai progress persiapan pembentukan BLU Ditjen PDSPKP;
- h. Keikutsertaan pada kegiatan pertemuan dalam rangka pembahasan hasil perbaikan dokumen usulan pembentukan BLU Ditjen PDSPKP pada tanggal 12 Desember 2023 di BBP3KP. Pertemuan dihadiri oleh Biro Keuangan KKP, Biro Hukum KKP, Bapak Darmadi Aries Wibowo, dan seluruh tim pembentukan BLU Ditjen PDSPKP;
- i. Keikutsertaan pada kegiatan pertemuan dalam rangka pembahasan usulan pembentukan BLU, Direktorat Jenderal PDSPKP dengan Direktorat PPK BLU – Kementerian Keuangan RI pada tanggal 18 Desember 2023 di Ruang Rapat Lounge Ditjen PDSPKP.

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja ini Ditjen PDSPKP telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp587.952.000,00. Realisasi anggaran sampai periode Triwulan IV sebesar Rp587.318.500,00. Realisasi anggaran ini setara dengan 99,89% terhadap total alokasi anggaran. Dalam hal ini terdapat efisiensi anggaran yang dapat terlihat dari persentase pencapaian

indikator kinerja sebesar 125,80% lebih besar daripada persentase realisasi anggaran yaitu sebesar 99,89%.

15. Persentase Lembar Kerja Data Produksi Ditjen PDSPKP yang Tervalidasi

Persentase Data Produksi Kelautan dan Perikanan yang Tervalidasi, merupakan penilaian atas capaian realisasi pendataan produksi terhadap *sampling* yang telah ditetapkan pada tahun berjalan serta capaian atas validasi nasional pada aplikasi validasi nasional *desktop* dalam ruang lingkup pendataan produksi kelautan dan perikanan.

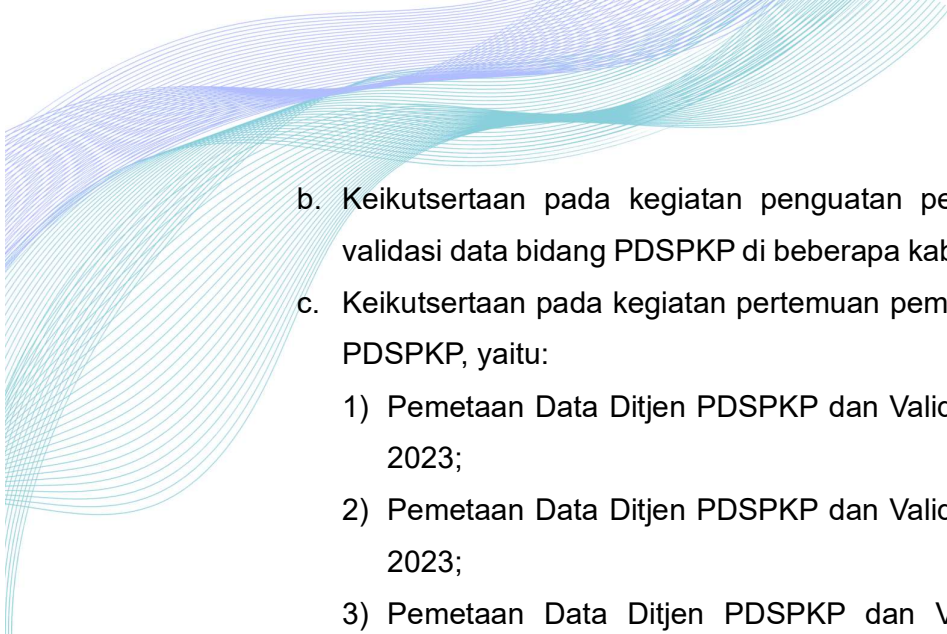
Tabel 18. Ikhtisar Pencapaian Persentase Lembar Kerja Data Produksi yang Tervalidasi Setditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target			Realisasi TW IV 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi TW IV 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi TW IV 2022-TW I 2023 (%)
	Tahun 2023	TW IV 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW IV 2023	Tahun 2024		
Persentase lembar kerja data produksi Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan yang tervalidasi (%)	100	100	-	100	100	100	-	-	-

Pada tahun 2023, Capaian Persentase lembar kerja data produksi Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan yang tervalidasi sebesar 100. Capaian dimaksud setara dengan 100% terhadap target tahun 2023 sebesar 100. Indikator kinerja ini merupakan indikator baru yang belum tercantum dalam dokumen rencana strategis Ditjen PDSPKP tahun 2020-2024 sehingga capaiannya tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya dan target jangka menengah tahun 2024.

Setditjen PDSPKP telah melakukan beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini antara lain :

- a. Keikutsertaan pada kegiatan *Workshop* Satu Data Bidang PDSPKP pada tanggal 6 – 8 September 2023;

- 
- b. Keikutsertaan pada kegiatan penguatan pendataan dan percepatan validasi data bidang PDSPKP di beberapa kabupaten/kota atau provinsi;
 - c. Keikutsertaan pada kegiatan pertemuan pembahasan satu data bidang PDSPKP, yaitu:
 - 1) Pemetaan Data Ditjen PDSPKP dan Validasi Satudata KKP, 28 Juli 2023;
 - 2) Pemetaan Data Ditjen PDSPKP dan Validasi Satudata KKP, 31 Juli 2023;
 - 3) Pemetaan Data Ditjen PDSPKP dan Validasi Satudata KKP, 3 Agustus 2023;
 - 4) Pemetaan Data Teknis Volume Produk Olahan, 8 – 9 Agustus 2023;
 - 5) Finalisasi Pedoman Pendataan Bidang PDSPKP, 18 Agustus 2023;
 - 6) Persiapan *Workshop* Satudata bidang PDSPKP 2023, 21 Agustus 2023;
 - 7) Pemetaan Data Ditjen PDSPKP dan Validasi Satudata KKP, 22 Agustus 2023;
 - 8) Validasi Harga Ikan, 24 Agustus 2023;
 - 9) Finalisasi *Draft* Pedoman Pendataan Bidang PDSPKP Tahun 2023, 25 Agustus 2023;
 - 10) Persiapan Pelaksanaan Validasi Nasional Satudata Kelautan dan Perikanan Semester I Tahun 2023, 21 September 2023.

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja ini Ditjen PDSPKP telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp3.630.966.000,00. Realisasi anggaran sampai periode Triwulan IV sebesar Rp3.629.890.947,00. Realisasi anggaran ini setara dengan 99,97% terhadap total alokasi anggaran. Dalam hal ini terdapat efisiensi anggaran yang dapat terlihat dari persentase pencapaian indikator kinerja sebesar 111,11% lebih besar daripada persentase realisasi anggaran yaitu sebesar 99,97%.

16. Persentase permasalahan hukum yang ditangani Lingkup Ditjen PDSPKP

Persentase permasalahan hukum yang ditangani Lingkup Ditjen PDSPKP adalah melalui Advokasi Hukum. Advokasi hukum adalah serangkaian tindakan pemberian bantuan hukum baik di dalam maupun di

luar pengadilan dan pemberian pembinaan hukum. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Advokasi Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Advokasi hukum meliputi bantuan hukum dan pembinaan hukum.

Tabel 19. Ikhtisar Pencapaian Persentase permasalahan hukum yang ditangani Lingkup Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target			Realisasi TW IV 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi TW IV 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi TW IV 2022-TW I 2023 (%)
	Tahun 2023	TW IV 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW IV 2023	Tahun 2024		
Persentase Permasalahan Hukum yang ditangani Lingkup Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (%)	100	100	-	100	100	100	-	-	-

Pada tahun 2023, Capaian Persentase permasalahan hukum yang ditangani Lingkup Ditjen PDSPKP sebesar 100. Capaian dimaksud setara dengan 100% terhadap target tahun 2023 sebesar 100. Indikator kinerja ini merupakan indikator baru yang belum tercantum dalam dokumen rencana strategis Ditjen PDSPKP tahun 2020-2024 sehingga capaiannya tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya dan capaian jangka menengah tahun 2024.

Setditjen PDSPKP melakukan advokasi terhadap proses penyelesaian permasalahan hukum seperti pemenuhan permintaan *fotocopy* dokumen, pendampingan pemeriksaan fisik bangunan, dan advokasi lainnya yang dibutuhkan dalam upaya penyelesaian permasalahan hukum. Pada triwulan IV permasalahan hukum yang ditangani pada triwulan adalah penyelesaian permasalahan pada gudang beku di Kabupaten Indramayu.

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja ini Ditjen PDSPKP telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp30.325,000,00. Realisasi anggaran sampai periode Triwulan IV sebesar Rp30.305.122,00. Realisasi anggaran ini setara dengan 99,93% terhadap total alokasi anggaran. Efisiensi anggaran juga terlihat dari persentase pencapaian indikator kinerja sebesar

100% lebih besar daripada persentase realisasi anggaran yaitu sebesar 99,93%.

17. Nilai Penilaian Mandiri Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) Lingkup Ditjen PDSPKP

Nilai Penilaian Mandiri Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) Lingkup Ditjen PDSPKP merupakan indeks yang diperoleh dari kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP). Sesuai amanat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, menyatakan bahwa penanggung jawab yang dalam hal ini adalah pimpinan kesekretariatan unit kerja yang menyelenggarakan pelayanan publik bertugas untuk melakukan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik. Kategori Indeks Pelayanan Publik adalah tingkat capaian Unit Pelayanan Publik berdasarkan kegiatan PEKPPP. Indeks Pelayanan publik dibagi menjadi 9 (sembilan kategori yang mencerminkan kualitas da berdasarkan Pedoman Menteri PAN dan RB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Berdasarkan Kepmen KP Nomor 54 Tahun 2022 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan diketahui pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Ditjen PDSPKP terdiri atas Pelayanan Administratif dan Pelayanan Jasa Publik, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pelayanan Administratif sebanyak 6 (enam) layanan yaitu:
 1. Perizinan Berusaha Subsektor Pengolahan Ikan yang diselenggarakan oleh Direktorat Usaha dan Investasi;
 2. Perizinan Berusaha Subsektor Pemasaran Ikan yang diselenggarakan oleh Direktorat Pemasaran;
 3. Penerbitan Surat Izin Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan yang diselenggarakan oleh Direktorat Logistik;
 4. Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang diselenggarakan oleh Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu;

5. Penerbitan Sertifikat Kesesuaian yang diselenggarakan oleh BBP3KP;
 6. Penerbitan Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) Wajib Tuna Dalam Kemasan Kaleng, Sarden dan Makerel Dalam Kemasan Kaleng yang diselenggarakan oleh BBP3KP;
- b. Pelayanan Jasa Publik sebanyak 4 (empat) layanan yaitu:
1. Penggunaan tanah dan/atau bangunan untuk kegiatan perikanan dan menunjang kegiatan perikanan yang diselenggarakan oleh BBP3KP;
 2. Penggunaan peralatan budidaya yang diselenggarakan oleh BBP3KP;
 3. Pemeriksaan/pengujian laboratorium terkait pelayanan pemeriksaan/uji mutu hasil perikanan yang diselenggarakan oleh BBP3KP.
 4. Pelayanan penggunaan peralatan dan mesin yang diselenggarakan oleh Direktorat Logistik;

Tabel 20. Ikhtisar Pencapaian Nilai Penilaian Mandiri Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPP) Lingkup Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target			Realisasi TW IV 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi TW IV 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi TW IV 2022-TW I 2023 (%)
	Tahun 2023	TW IV 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW IV 2023	Tahun 2024		
Nilai Penilaian Mandiri Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPP) Lingkup Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Nilai)	4,1	4,1	-	4,31	105,12	105,12	-	-	-

Pada tahun 2023, Capaian Nilai Penilaian Mandiri Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPP) Lingkup Ditjen PDSPKP sebesar 4,31. Capaian dimaksud setara dengan 105,12% terhadap target tahun 2023 sebesar 4,1. Indikator kinerja ini merupakan indikator baru yang belum tercantum dalam dokumen rencana strategis Ditjen PDSPKP tahun

2020-2024 sehingga capaiannya tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya dan capaian jangka menengah tahun 2024.

Ditjen PDSPKP telah melakukan beberapa kegiatan guna mendukung pencapaian target indikator kinerja ini antara lain:

1. Melaksanakan rapat tindak lanjut forum konsultasi publik pada tanggal 23 Oktober 2023;
2. Bimbingan teknis penerapan komunikasi inklusif dan memaksimalkan budaya pelayanan prima Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan pada tanggal 13 – 15 November 2023



Gambar 14 Bimbingan Teknis Penerapan Komunikasi Inklusif dan Memaksimalkan Budaya Pelayanan Prima Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan

3. Pembahasan tindak lanjut laporan hasil evaluasi mandiri implementasi pelayanan publik tahun 2023 Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP pada tanggal 16 November 2023;
4. Melakukan koordinasi tindak lanjut laporan hasil evaluasi inspektorat jenderal terkait evaluasi mandiri implementasi pelayanan publik tahun 2023 Ditjen PDSPKP, Revisi Standar Pelayanan, Dan Rencana Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik pada tanggal 1 Desember 2023;
5. Pembahasan Revisi Standar Pelayanan pada tanggal 5 Desember 2023;
6. Forum Konsultasi Publik pada tanggal 13 Desember 2023;



Gambar 15 Forum Konsultasi Publik, tanggal 13 Desember 2023

7. Pembahasan laporan SKM periode triwulan IV Tahun 2023 pada tanggal tanggal 21 Desember 2023.

Sasaran Kegiatan 2.

Terwujudnya Layanan Sarana dan Prasarana Internal lingkup Ditjen PDSPKP yang Efisien, Efektif, dan Berorientasi pada Layanan Prima

18. Persentase Pemenuhan Layanan Internal/Overhead lingkup Ditjen PDSPKP

Pemenuhan layanan internal/*overhead* lingkup Ditjen PDSPKP merupakan layanan perkantoran yang berupa pengadaan sarana dan prasarana guna mendukung operasional perkantoran lingkup Ditjen PDSPKP. Kegiatan ini berupa pengadaan sarana internal alat pengolah data serta sarana internal meubelair dan barang modal lainnya.

Tabel 21. Ikhtisar Pencapaian Persentase Pemenuhan Layanan Internal/Overhead lingkup Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target			Realisasi TW IV 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi TW IV 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi TW IV 2022-TW I 2023 (%)
	Tahun 2023	TW IV 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW IV 2023	Tahun 2024		
Persentase pemenuhan layanan internal/ <i>overhead</i> lingkup Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (%)	100	100		100	100	100		100	

Persentase Pemenuhan Layanan Internal/*Overhead* lingkup Ditjen PDSPKP Triwulan IV tahun 2023 tercapai sebesar 100%. Capaian ini setara dengan 100% terhadap target tahun 2023. Dalam upaya pencapaian indikator kinerja ini, Ditjen PDSPKP telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp1.550.000.000,00. dan telah terealisasi sebesar Rp1.544.504394,00. Realisasi anggaran ini setara dengan 99,64% terhadap total pagu anggaran. Dalam hal ini terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp5.495.606,00. Efisiensi anggaran juga dapat terlihat dari

persentase pencapaian indikator kinerja sebesar 100% lebih besar daripada persentase realisasi anggaran yaitu sebesar 99,64%.

Sasaran Kegiatan 3.

Terwujudnya Pelaksanaan Layanan Perkantoran lingkup Ditjen PDSPKP yang Efisien, Efektif, dan Berorientasi pada Layanan Prima

19. Jumlah Pemenuhan Layanan Perkantoran lingkup Ditjen PDSPKP

Pemenuhan layanan perkantoran merupakan kegiatan layanan operasional perkantoran yang berupa terselenggaranya gaji dan tunjangan untuk pembayaran belanja pegawai serta operasional dan pemeliharaan kantor di lingkungan Direktorat Jenderal PDSPKP.

Tabel 22. Ikhtisar Pencapaian Jumlah Pemenuhan Layanan Perkantoran lingkup Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target			Realisasi TW IV 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)			Realisasi TW IV 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi TW IV 2022-TW I 2023 (%)
	Tahun 2023	TW IV 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	TW IV 2023	Tahun 2024		
Jumlah pemenuhan layanan perkantoran lingkup Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Bulan)	12	3		3	25	100		3	-

Persentase Pemenuhan Layanan Perkantoran lingkup Ditjen PDSPKP Triwulan IV tahun 2023 tercapai sebanyak 3 bulan. Capaian ini setara dengan 25% terhadap target 2023 yaitu 12 bulan, atau 100% terhadap target Triwulan IV tahun 2023 yaitu 3 bulan.

Ditjen PDSPKP telah melakukan beberapa kegiatan guna mendukung pencapaian target indikator kinerja ini antara lain:

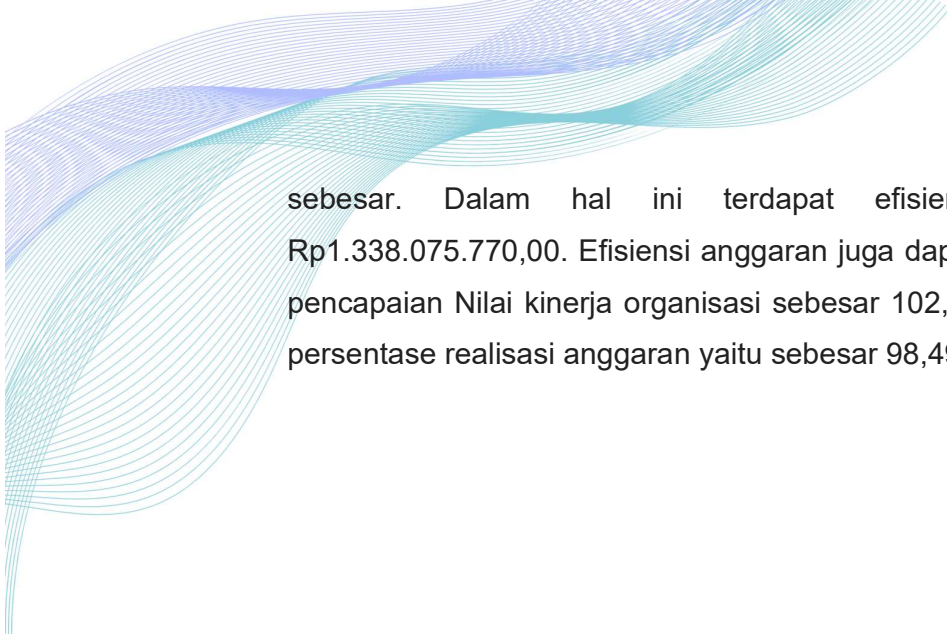
- a. Pelaksanaan pembayaran gaji dan tunjangan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) selama bulan Oktober sampai dengan Desember 2023 dengan tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Pembayaran honor Pegawai Negeri Non ASN selama bulan Oktober sampai dengan Desember sampai dengan tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku;

- c. Pembayaran honorarium pejabat pengelola perbendaharaan di lingkungan Ditjen PDSPKP dari Bulan Oktober sampai dengan Desember sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran Sekretariat Ditjen PDSPKP, seperti pembayaran telepon, belanja sewa tanaman, pemeliharaan kendaraan pejabat dan operasional, belanja keperluan perkantoran dan sehari-hari;
- e. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran di lingkungan Satker Direktorat Usaha dan Investasi, Direktorat Logistik, Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu, Direktorat Pemasaran;
- f. Penyelenggaraan pemeliharaan dan operasional Pasar Ikan Modern di Muara Baru Jakarta, *Cold Storage* 1000 Ton di Muara Baru Jakarta dan Kapal Jananuraga yang berada di Sabang, Aceh.

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja ini, Ditjen PDSPKP telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp61.699.318.000,00. dan telah terealisasi sebesar Rp60.477.744.255,00. Realisasi anggaran ini setara dengan 97,97% terhadap total pagu anggaran. Dalam hal ini terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp1.251.573.745,00. Efisiensi anggaran juga dapat terlihat dari persentase pencapaian indikator kinerja sebesar 100% lebih besar daripada persentase realisasi anggaran yaitu sebesar 97,97%.

C. Realisasi Anggaran

Pelaksanaan anggaran harus dikelola dengan optimal sesuai rencana yang telah ditetapkan dan harus dapat dipertanggungjawabkan. Pada tahun 2023, anggaran Sekretariat Ditjen Penguatan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan yang dikelola (pagu anggaran awal) adalah sebesar Rp95.861.679.000,00 (Sembilan puluh lima miliar delapan ratus enam puluh satu juta enam ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) yang seluruhnya merupakan APBN rupiah murni. Setelah *Auto Adjustment* (AA) sudah pindah ke BA BUN maka anggaran Setditjen PDSPKP menjadi sebesar Rp88.677.058.000,00 (Delapan puluh delapan milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta lima puluh delapan ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp87.338.982.230,00 setara dengan 98,49% terhadap pagu anggaran



sebesar. Dalam hal ini terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp1.338.075.770,00. Efisiensi anggaran juga dapat terlihat dari persentase pencapaian Nilai kinerja organisasi sebesar 102,31% lebih besar daripada persentase realisasi anggaran yaitu sebesar 98,49%.



BAB IV **PENUTUP**

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Ditjen PDSPKP Triwulan IV Tahun 2023 ini menyajikan berbagai keberhasilan dan kegagalan capaian sasaran program yang telah ditetapkan selama periode Bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2023 dan perkembangan tahun-tahun sebelumnya, yang tercermin pada capaian indikator kinerja. Secara umum, capaian sasaran program Sekretariat Ditjen PDSPKP telah tercapai dengan baik ditunjukkan dengan NKO >100% yaitu sebesar 102,31%.

Meskipun demikian, upaya perbaikan peningkatan kinerja tetap akan dilakukan secara berkelanjutan oleh seluruh jajaran Sekretariat Ditjen PDSPKP antara lain melalui perencanaan dan penganggaran yang baik, ketatalaksanaan yang efisien, pengembangan dan pembinaan SDM yang profesional, peningkatan akuntabilitas, penerapan budaya kerja yang baik dan pelaporan yang tertib, sehingga pada akhirnya mampu mewujudkan visi yang telah ditetapkan.

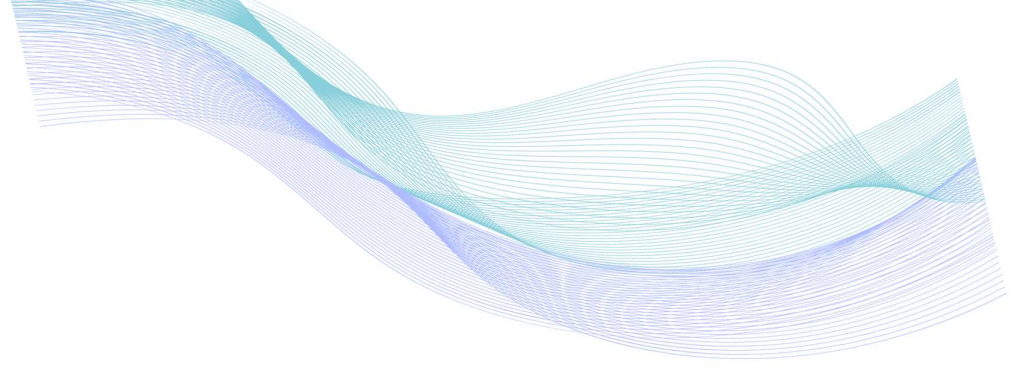
Laporan Kinerja ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa-masa mendatang.

B. Permasalahan dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil pengukuran atas kinerja Setditjen PDSPKP triwulan IV tahun 2023, terdapat 2 indikator kinerja yang tidak mencapai target yakni Indikator Kegiatan Pelaksanaan Anggaran dan Nilai Kinerja Anggaran.

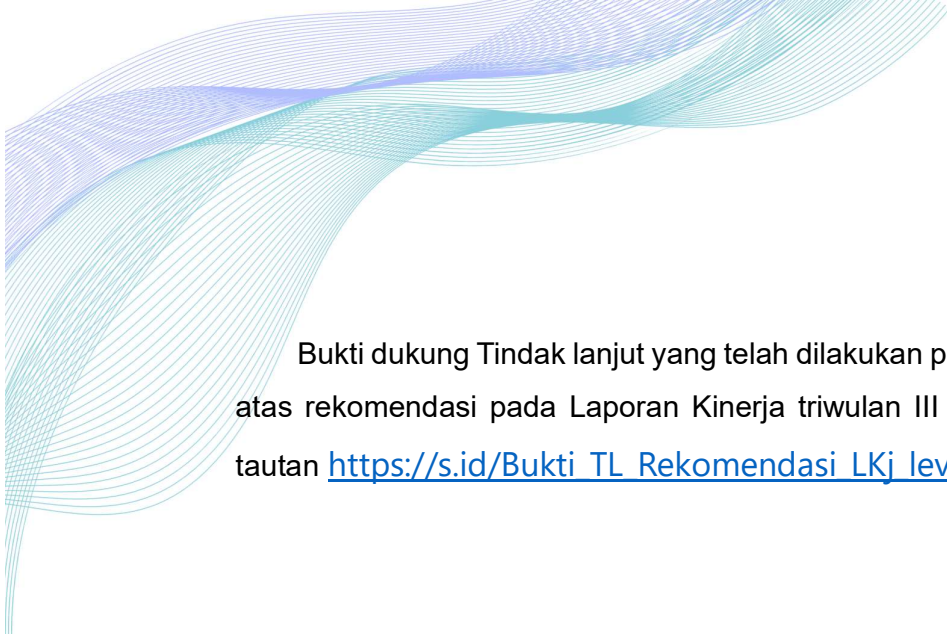
Adapun permasalahan dan rencana tindak lanjut ke depan antara lain:

Indikator Kinerja	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	<ul style="list-style-type: none">• Adanya deviasi halaman III DIPA yang disebabkan kurang sesuai nya realisasi pelaksanaan anggaran dengan rencana penarikan dana;• Anggaran belum seluruhnya dapat direalisasikan.	<ul style="list-style-type: none">• Melaksanakan koordinasi terkait sinkronisasi penginputan target dan data capaian output berdasarkan secara berkala;• Koordinasi dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan dan anggaran baik fisik maupun nonfisik;• Melakukan pemantauan dan evaluasi atas rencana penarikan dana pada lembar III DIPA dengan realisasi pelaksanaan anggaran dan menyusun prognosa realisasi anggaran sampai dengan Desember 2024.
Nilai Kinerja Anggaran	<ul style="list-style-type: none">• Adanya deviasi halaman III DIPA yang disebabkan kurang sesuai nya realisasi pelaksanaan anggaran dengan rencana penarikan dana;• Anggaran belum seluruhnya dapat direalisasikan.	<ul style="list-style-type: none">• Melaksanakan koordinasi terkait sinkronisasi penginputan target dan data capaian output berdasarkan secara berkala;• Koordinasi dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan dan anggaran baik fisik maupun nonfisik;• Melakukan pemantauan dan evaluasi atas rencana penarikan dana pada lembar III DIPA dengan realisasi pelaksanaan anggaran dan menyusun prognosa realisasi anggaran sampai dengan Desember 2024.



LAMPIRAN





Bukti dukung Tindak lanjut yang telah dilakukan pada triwulan IV tahun 2023 atas rekomendasi pada Laporan Kinerja triwulan III tahun 2023 sebagaimana tautan [https://s.id/Bukti TL Rekomendasi LKj lev2 TW 2023](https://s.id/Bukti_TL_Rekomendasi_LKj_lev2_TW_2023).



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING
PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3500132
LAMAN www.kkp.go.id SUREL persuratan.pds@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIAT DITJEN PDSPKP**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Machmud**
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **Budi Sulistiyo**
Jabatan : Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2023

**Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Penguatan Daya
Saing Produk Kelautan dan
Perikanan**



Budi Sulistiyo

**Pihak Pertama,
Sekretaris Direktorat
Jenderal Penguatan Daya
Saing Produk Kelautan dan
Perikanan**



Machmud

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

SEKRETARIAT DITJEN PDSPKP

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Terlaksananya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di Lingkungan Direktorat Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang – Undangan bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan (%)	100
		2	Nilai Pengawasan Kearsipan di Unit Kearsipan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Nilai)	75
		3	Persentase dokumen Kerjasama yang disusun/ditindalajuti oleh Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (%)	80
		4	Rasio jumlah pemberitaan negatif bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan terhadap total pemberitaan sektor kelautan dan perikanan (%)	≤5
		5	Persentase pemenuhan dokumen Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (%)	100
		6	Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan(Indeks)	83,2
		7	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Nilai)	80,5
		8	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	100
		9	Persentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di Lingkungan	75

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
			Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (%)	
		10	Persentase Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan yang menerapkan manajemen pengetahuan terstandar (%)	92
		11	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Nilai)	93,75
		12	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Nilai)	86
		13	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (%)	77,5
		14	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (%)	77,5
		15	Persentase lembar kerja data produksi Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan yang tervalidasi (%)	100
		16	Persentase permasalahan hukum yang ditangani Lingkup Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan(%)	100
		17	Nilai Penilaian Mandiri Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPP) Lingkup Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan(Nilai)	4,1

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
2	Terwujudnya Layanan Sarana dan Prasarana Internal Lingkup Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan yang efisien, efektif dan berorientasi pada layanan prima	18	Persentase pemenuhan layanan internal/overhead Lingkup Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (%)	100
3	Terwujudnya pelaksanaan layanan Perkantoran Lingkup Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan yang efisien, efektif dan berorientasi pada layanan prima	19	Jumlah pemenuhan layanan perkantoran Lingkup Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan(Bulan)	12

DATA ANGGARAN

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	88,677,058,000
Total		88,677,058,000

Jakarta, Desember 2023

**Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Penguatan Daya
Saing Produk Kelautan dan
Perikanan**



Budi Sulistiyo

**Pihak Pertama,
Sekretaris Direktorat
Jenderal Penguatan Daya
Saing Produk Kelautan dan
Perikanan**



Machmud



Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
Gedung Mina Bahari III Lantai 14
Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16 Jakarta Pusat
Kementerian Kelautan dan Perikanan